



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**IMPLEMENTASI MUHIBAH KRI DEWA RUCI DALAM MENDUKUNG
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DAN POROS MARITIM
DUNIA**

INDIRA RIZKI AMALIA

120170103012

**Tesis Yang Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI DIPLOMASI PERTAHANAN**

**BOGOR
JANUARI 2019**

UNIVERSITAS PERTAHANAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan salah satu manifestasi kedaulatan suatu negara. Konsep negara kepulauan (nusantara), kekayaan yang berlimpah, posisi strategis antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, kemudian terletak di posisi silang diantara dua benua yaitu benua Australia dan Asia yang menguntungkan secara geoekonomi dan geostrategi merupakan anugerah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur transportasi laut negara-negara di dunia. Bagi negara Indonesia dimana sebagian besar wilayahnya berupa perairan, laut sangat vital bagi umat manusia dalam banyak hal, misalnya eksplorasi sumber daya alam, pembangunan kekuatan militer, media pemersatu, media perhubungan dan media pertahanan serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kemaritiman.

Disisi lain, konsep kelautan sendiri bagi Indonesia sudah ada dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang juga melahirkan konsep wawasan nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah NKRI meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Secara internasional diperkuat dengan *United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982. Adanya posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menempatkan TNI Angkatan Laut (AL) memiliki peran yang penting dalam pertahanan negara khususnya matra laut.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan

bangsa dan negara.¹ TNI Angkatan Laut sebagai salah satu alat pertahanan negara menjalankan tugas berdasarkan kepada kebijakan dan keputusan politik negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945. Merujuk pada Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 mengenai tugas TNI Angkatan Laut yaitu :²

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Kemudian secara aktif TNI Angkatan Laut juga ikut dalam pemeliharaan perdamaian nasional, regional maupun internasional yang berfokus pada tugas-tugas yang diemban melalui pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).³

Secara universal Angkatan Laut memiliki tiga peran dan fungsi yaitu militer, polisionil, serta peran diplomasi.⁴ Peran Militer (*military role*) dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. Peran Polisionil (*constabulary role*)

¹ Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

² Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9

³ Marsetio, Strategi Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis, Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol XVII. No. 1 Februari 2013.

⁴ Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*, London: Croom Helm, Ltd. 2013, 1977

dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional dalam rangka memelihara ketertiban laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya. Peran diplomasi (*diplomacy role*) Angkatan Laut merupakan peran yang sangat penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi yang bersitegang.

Adapun ketiga peran dan fungsi tersebut secara yuridis telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tugas TNI Angkatan Laut yakni UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 9. Diplomasi merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah Indonesia.⁵ Hubungan antar bangsa selalu diwarnai dengan pola kerjasama sehingga upaya pemenuhan kepentingan nasional suatu negara menggunakan semua instrumen yang ada dalam kekuatan nasional suatu negara. Perkembangan lingkungan strategis dan globalisasi menggarisbawahi akan pentingnya kekuatan TNI Angkatan Laut dalam menempatkan kerjasama antar negara baik itu dalam bidang politik, ekonomi, militer dan budaya.

Dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri berbagai cara ditempuh oleh para diplomat untuk kekuatan nasional baik itu masa damai serta strategi dan taktik militer oleh para pemimpin militer untuk kekuatan

⁵ Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi., S.E., M.AP dalam program pendidikan dan latihan sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (SESPARLU) Maret 2018 di Kantor Kemenlu RI Jakarta Pusat.

nasional saat masa perang.⁶ Dalam kompetisi antar bangsa sebagai unjuk kekuatan, maka salah satu faktor yang menciptakan kekuatan bagi suatu bangsa adalah kualitas diplomasi.⁷

Sehingga kekuatan diplomasi Angkatan Laut yang juga turut didukung dengan perkuatan unsur lain yang menyatu dengan kekuatan pertahanan disesuaikan dengan kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadikan kekuatan diplomasi yang handal dan juga faktual. Kualitas diplomasi juga menentukan tercapainya atau tidak suatu kepentingan nasional, karena diplomasi merupakan salah satu unsur kekuatan nasional. Diplomasi dan militer adalah unsur dari instrumen kekuatan nasional. Sehingga perpaduan kedua ini merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional.

Praktek daripada diplomasi Angkatan Laut tidak hanya mengarah pada diplomasi yang koersif, namun kekuatan Angkatan Laut bisa menjadi instrumen *Cooperation Diplomacy*. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi perang. Peran Diplomasi ini juga meliputi : *Preventive Deployment, Coercion, Maritime Interdiction Operations (MIO), Peace and Support Operations (PSO), Non Combatant Evacuation Operations (NEO), Civil Military Cooperation (CIMIC), Symbolic Use, Presence, Humanitarian Assistance, Confidence Building Measures, Track Two Diplomacy*.⁸ Meluasnya spektrum diplomasi ini juga memunculkan istilah konsep diplomasi pertahanan.

Diplomasi Pertahanan merupakan *tools* yang digunakan untuk mengurangi potensi terjadinya konflik antar negara. Fokus dari diplomasi pertahanan bukanlah memenangkan perang karena pada hakikatnya,

⁶ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, revised, New York: Alfred A. Knoph, 1973, hal. 146

⁷ *Ibid*

⁸ National Defense Canada Directorate of Maritime Strategy. Leadmark: The Navys Strategy for 2020

diplomasi pertahanan bertujuan menjaga agar dunia berada dalam keadaan aman, damai serta stabil.⁹ Dalam tatanan internasional, diplomasi pertahanan hadir dengan berbagai bentuk, dimana bentuk-bentuk ini dikerjakan oleh pihak militer suatu negara. Berbagai bentuk ini hadir sebagai realisasi dari beberapa tujuan umum diplomasi pertahanan antara lain:¹⁰

- a. Sebagai kehadiran atau perwakilan (*representation*);
- b. Efek/daya tangkal, dengan memberikan penerangan tentang apa yang kita kerjakan;
- c. Negosiasi dan proses tawar menawar;
- d. Peningkatan kemampuan dan kredibilitas;
- e. Menurunkan keinginan negara yang berseberangan kepentingan untuk melakukan berbagai hal yang tidak diinginkan;
- f. Mengumpulkan informasi;
- g. Peningkatan kontak;
- h. membentuk opini publik;

Lebih lanjut diplomasi pertahanan juga dapat di implementasikan sebagai cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan yang nantinya diplomasi tersebut ditujukan untuk dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan.¹¹ Diplomasi Pertahanan merupakan bagian dari diplomasi yang sangat berkaitan erat dengan domain pertahanan, dalam rangkaian misalnya pameran kekuatan serta penggunaan kekuatan, pengiriman tentara untuk misi perdamaian, serta kerjasama di bidang militer dan pelaksanaan latihan bersama.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut maka disini peran TNI khususnya TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan dalam rangka

⁹ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal. 178-179

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Rhodon Pedrason, *ASEAN's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community?*, Heidelberg: Universitas Heidelberg, 2015. hal 15

menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan Indonesia sangat vital. Selain melaksanakan berbagai aktivitas diplomasi pertahanan seperti mengirimkan perwakilan dan melaksanakan latihan bersama dengan angkatan laut negara lain, TNI Angkatan Laut juga ikut terlibat dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia. Dalam praktek lapangannya, promosi kebudayaan Indonesia ini telah menjadikan TNI Angkatan Laut sebagai duta keliling bagi Indonesia dalam rangka mengenalkan bangsa Indonesia di dunia internasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor MP/H1254 tanggal 11 Januari 1954 mengenai muhibah KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci ini merupakan kapal layar Indonesia dan juga sekaligus sebagai kapal latihan bagi para cadet Taruna TNI Angkatan Laut tingkat III. Dalam kebijakan tersebut ditetapkan bahwa misi diplomasi oleh TNI Angkatan Laut dijalankan salah satunya melalui muhibah dengan menggunakan KRI Dewa Ruci.



Gambar 1.1 KRI Dewa Ruci

Sumber : Dokumentasi Dinas Penerangan Angkatan Laut, 2014

Kegiatan muhibah tersebut merupakan salah satu contoh pengenalan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Melalui kebijakan

tersebut misi yang diemban oleh KRI Dewa Ruci ini tidak hanya sebagai pengenalan budaya saja namun juga menjadi salah satu instrumen diplomasi bagi TNI Angkatan Laut. Promosi kebudayaan melalui muhibah KRI Dewa Ruci ini terealisasikan dalam tugas tambahan para taruna tingkat III TNI Angkatan Laut dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan negara di mata dunia.

Penggunaan kekuatan atau *power* suatu negara ada dua bentuk dalam mencapai kepentingan nasionalnya, yakni *hard power* dan *soft power*. Hal ini yang kemudian konsep penggunaan *power* merupakan hal yang penting dalam dunia internasional. Cara-cara non konvensional seperti yang dilakukan oleh KRI Dewa Ruci dalam melaksanakan misi muhibahnya ini termasuk dalam penyebaran *soft power*. Menurut Teori Joseph Nye dalam bukunya yang berjudul *Public Diplomacy and Soft Power* menjelaskan bahwa *soft power* adalah "*the ability to get what you want through attraction rather than through coercion or payments*".¹² Dengan menggunakan *soft power* ini pihak lain dapat melakukan hal yang menguntungkan kita tanpa kita meminta atau memaksanya.

Tidak hanya kegiatan promosi budaya Indonesia saja namun muhibah KRI Dewa Ruci juga turut serta dalam festival internasional yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut negara sahabat. KRI Dewa Ruci ini juga merupakan simbol kejayaan laut Indonesia *Jalasveva Jayamahe*. Keikutsertaan muhibah KRI Dewa Ruci dalam pelayaran Internasional sekaligus untuk menunjukkan kebanggaan Indonesia di mata dunia internasional dan sekaligus pembentukan opini publik. Kegiatan muhibah ini merupakan dimulainya titik awal perjuangan dan diplomasi yang sarat akan semangat untuk menunjukkan nilai-nilai dan martabat bangsa kepada dunia.

Adapun dalam implementasi diplomasinya ini KRI Dewa Ruci sudah dua kali melakukan muhibah keliling dunia, pertama di tahun 1964 dan

¹² Joseph S. Nye, Jr, *Public Diplomacy and Soft Power*, Public Affairs: New York, 2008, Hal.94

tahun 2012.¹³ Partisipasi KRI Dewa Ruci secara dunia internasional juga aktif dalam mengikuti rangkaian *Tall Ship Race* mulai dari Yunani dan di berbagai negara lainnya seperti Belgia, Denmark, Norwegia, Inggris, Perancis dan Belanda. Misi yang dibawa oleh KRI Dewa Ruci ini utamanya sebagai duta keliling Indonesia yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan keanekaragaman Indonesia. Dalam menjalankan diplomasinya KRI Dewa Ruci tidak hanya mengenalkan budaya saja namun mereka juga ternyata diplomasi dalam kuliner Indonesia disebut juga dengan istilah *gastro diplomacy*. Prestasi yang diraihinya pun juga sudah banyak dalam setiap festival misalnya sebagai peraih *most popular Tallship, most entertaining waterford city*, dan beragam penghargaan lainnya yang dicapai oleh KRI Dewa Ruci. Hal ini juga sebagai pembuktian eksistensi KRI Dewa Ruci di dunia Internasional.

Diplomasi budaya yang ditawarkan oleh KRI dewa Ruci dalam setiap misi muhibahnya ini merupakan aplikasi dari teori *Soft Power* dari Joseph Nye yang menjelaskan bahwa apabila suatu negara menggunakan *soft power* maka pihak lain akan dapat melakukan hal yang yang negara tersebut inginkan tanpa harus memaksanya untuk melakukan hal tersebut, *soft power* suatu negara bersumber dari budaya, nilai-nilai dan kebijakan.¹⁴ Kegiatan misi muhibah KRI Dewa Ruci merupakan konsekuensi daripada tugas yang dimandatkan oleh TNI Angkatan Laut yang juga selaras dengan pencapaian visi Pemerintah yakni menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sehingga kedepannya TNI Angkatan Laut akan menjadi salah satu elemen kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan Poros Maritim Dunia.

¹³ Abba Gabrillin. Mengunjungi KRI Dewa Ruci yang jadi kebanggaan TNI AL dan dunia. 2017 dalam Kompas.com
<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/09214441/mengunjungi-kri-dewaruci-yang-jadi-kebanggaan-tni-al-dan-dunia.com> diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

¹⁴ Joseph Nye, *Soft Power – The Means to Success in World Politics*, New York: Public Affairs, 2004

Kebijakan Poros Maritim Dunia ini merupakan gagasan oleh Presiden Joko Widodo saat terpilih menjadi presiden Indonesia, gagasan ini disampaikan dalam pidatonya pada KTT Asia Timur di Myanmar bulan November 2014. Kebijakan Poros Maritim Dunia ini ialah sebuah cita-cita mengenai Indonesia untuk kembali ke jati diri sebagai bangsa bahari dengan melestarikan budaya maritim. Adanya doktrin pemerintah ini juga mengajak bangsa Indonesia untuk melihat secara lebih jauh Indonesia menjadi negara poros maritim dunia serta transformasi berbagai agenda atau kegiatan yang nantinya akan diimplementasikan oleh Pemerintah. Bernhard Limbong juga dalam bukunya poros maritim menyatakan bahwa Poros Maritim Dunia ditujukan untuk mencapai kepentingan politis dan ekonomis.¹⁵

Adapun kepentingan ekonomi ini melalui kebijakan poros maritim dunia ialah untuk meningkatkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi misalnya dengan peningkatan akses pelayaran internasional yang melewati Indonesia kemudian dari bidang politik ialah dengan meningkatnya pengaruh Indonesia pada sistem Internasional melalui kebijakan poros maritim dunia. Poros maritim dunia ini dijabarkan melalui 7 pilar Kebijakan Kelautan Indonesia menurut Perpres RI No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia:

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan keselamatan di Laut
3. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut
4. Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan
5. Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut
6. Budaya Bahari
7. Diplomasi Maritim

¹⁵ Bernhard Limbong, Poros Maritim, Jakarta: PT Dharma Karya, 2015

Dari tujuh pilar utama yang dijelaskan diatas, penelitian ini akan memfokuskan kepada pilar pertama, pilar ke enam dan pilar ketujuh yakni mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia, Budaya Bahari, dan dan Diplomasi Maritim yang kemudian dijalankan nantinya melalui kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci merupakan bagian dari tempaan untuk nantinya menjadi ksatria-ksatria maritim yang tangguh. Hal ini bukan berarti militerlistis namun membangun jiwa kebersamaan untuk kebaharian demi persiapan nantinya Indonesia sebagai poros maritim dunia.¹⁶

Adapun pemanfaatan kekuatan TNI Angkatan Laut dalam hal ini KRI Dewa Ruci ini merupakan kepanjangan tangan politik luar negeri pemerintah dengan tugas diplomasinya yang terus dikembangkan. KRI Dewa Ruci merupakan kapal *non combatant* yang memiliki peran penting dalam diplomasi sejalan dengan penciptaan opini publik kepada masyarakat baik itu dalam skala nasional, regional dan global. Hal ini dilatarbelakangi oleh misi budaya yang dibawa oleh KRI Dewa Ruci ini juga dapat meningkatkan pemahaman budaya indonesia kepada negara lain dan meningkatkan pula citra daripada TNI Angkatan Laut sejalan dengan tujuan *capacity building* yang ada di dalam konsep *Confidence Building Measures* (CBM) tersebut.

Kunjungan atau muhibah dengan KRI Dewa Ruci ini digunakan juga untuk menunjukkan keberadaan negara Indonesia, adapun muhibah ini bukan ditujukan untuk melakukan suatu negosiasi seperti yang dilakukan oleh diplomat atau delegasi tertentu melainkan membawa misi diplomasi yang tujuannya untuk damai dan penciptaan CBM. Kemudian disini juga pemahaman mengenai kemaritiman juga ditujukan selaras dengan penerapan kebijakan visi Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo

¹⁶ Kemenko Maritim RI. Ekspedisi Nusantara Jaya KRI Dewa Ruci Bukan Militeristis Tetapi Membangun Jiwa Kebaharian Generasi Muda. 2017. dalam <https://maritim.go.id/enj-kri-dewa-ruci-bukan-militeristis-tetapi-membangun-jiwa-kebaharian-generasi-muda/> diakses pada tanggal 6 Juli 2018.

utamanya pilar ke enam tentang budaya bahari dan pilar ketujuh mengenai diplomasi maritim.

Kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci ini juga sebagai implementasi dari CBM negara Indonesia terhadap negara-negara sahabat di setiap kunjungannya. Tak hanya itu pembentukan *capacity building* bagi para cadet taruna TNI AL tingkat III juga sangat penting demi menjadikan TNI Angkatan Laut yang mempunyai kemampuan kompetensi dalam bidang kemaritiman dan kebaharian melalui disetiap muhibah KRI Dewa Ruci. Namun terlepas dari diplomasi yang telah dilakukan oleh KRI Dewa Ruci ini pada dasarnya diplomasi dalam hal budaya yang sangat ditonjolkan, disini peneliti mencoba menganalisis bagaimana implementasi dari diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh KRI Dewa Ruci dalam setiap misi muhibahnya. Diplomasi pertahanan disini bertujuan menjadi salah satu unsur dalam setiap kegiatan KRI Dewa Ruci yang nantinya akan mendukung dalam pencapaian visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sehingga peneliti disini tertarik untuk mengambil judul penelitian “Implementasi Muhibah KRI Dewa Ruci dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Poros Maritim Dunia”.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan pandangan terkait pelaksanaan diplomasi pertahanan TNI Angkatan Laut melalui misi muhibah KRI Dewa Ruci dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Adapun subfokus pada penelitian ini yaitu:

1. KRI Dewa Ruci dalam melaksanakan Diplomasi
2. KRI Dewa Ruci sebagai implementasi pilar-pilar Poros Maritim Dunia
3. Implementasi Muhibah KRI Dewa Ruci dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Poros Maritim Dunia

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka implementasi diplomasi KRI Dewa Ruci dalam diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia perlu dianalisis secara holistik. Sehingga rumusan masalah yang akan dijadikan fokus dan perhatian pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana KRI Dewa Ruci dalam melaksanakan Diplomasi ?
2. Bagaimana implementasi KRI Dewa Ruci berdasar pilar-pilar Poros Maritim Dunia?
3. Bagaimana Implementasi Muhibah KRI Dewa Ruci dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Poros Maritim Dunia?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Sesuai dengan fokus, subfokus dan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi diplomasi KRI Dewa Ruci dalam diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung Poros Maritim Dunia.

1.4.2 Tujuan spesifik

Sesuai dengan fokus, subfokus dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci dalam melaksanakan Diplomasi
2. Menganalisis implementasi KRI Dewa Ruci yang berdasar pilar-pilar Poros Maritim Dunia
3. Menganalisis Muhibah KRI Dewa Ruci dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Poros Maritim Dunia

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis, nantinya dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan, serta wawasan untuk memperdalam ilmu mengenai diplomasi, khususnya diplomasi Angkatan Laut dan diplomasi pertahanan agar dapat menjadi sebuah teori bukan hanya sebagai konsep saja. Secara khusus, suatu masalah dapat menjadi solusi atau alternatif yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui pendekatan pisau analisis diplomasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat dicapai dari penerapan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada TNI Angkatan Laut, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri RI, serta Kementerian Pertahanan RI dan stakeholder terkait untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mendukung upaya Diplomasi KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci digunakan sebagai salahsatu elemen dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kemudian juga secara praktis dapat memberi masukan bagi KRI Bima Suci sebagai penerus KRI Dewa Ruci dalam melakukan muhibah keluar negeri. Di sisi lain, bagi kalangan akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran dan selain itu juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya dalam pengembangan penelitian yang lebih mendalam.

1.6 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini difokuskan dan dibatasi dari Pendekatan Diplomasi Angkatan Laut melalui muhibah KRI Dewa Ruci dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Akhir Studi di Universitas Pertahanan tahun 2017 yang

terlampir dalam Peraturan Rektor Unhan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Pertahanan, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab Adapun rincian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; terdiri dari lima sub-bab antara lain: latar belakang penelitian, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Bab II Kajian Teoritik; terdiri dari sub-bab deskripsi konseptual, hasil penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka pemikiran

Bab III Metode Penelitian; berisi 5 sub-bab antara lain: tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; berisi 2 sub-bab yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Daftar Pustaka

BAB 2

KAJIAN TEORETIK

2.1. Deskripsi Konseptual

Penelitian dengan judul ***“Implementasi muhibah KRI Dewa Ruci dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Poros Maritim Dunia”*** mengacu pada buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah serta literatur terkait yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan data-data sekunder. Peneliti juga akan mengumpulkan data-data di lapangan yang berupa data hasil temuan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan-informan yang dapat dipercaya sebagai pedoman utama untuk mendapatkan data-data primer dalam penelitian.

Merujuk pada hal-hal diatas, maka penelitian ini juga untuk menganalisis Diplomasi Pertahanan yang menjadi instrumen penting dalam menghubungkan antara tugas TNI Angkatan Laut melalui misi muhibah KRI Dewa Ruci yang nantinya turut menjadi salah satu elemen dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam penelitian ini juga digunakan teori-teori serta konsep yang akan digunakan antara lain : teori pertahanan negara, teori diplomasi, konsep diplomasi pertahanan, teori peran universal Angkatan Laut dan tinjauan konseptual poros maritim dunia serta konsep *soft power*.

Disamping itu, peneliti juga melihat pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, pada sub-bab deskripsi kontekstual juga akan dibahas mengenai landasan-landasan teori maupun konsep yang akan digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang nantinya akan dihadapkan pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sehingga untuk dapat menganalisis data tersebut maka diperlukan penjelasan yang komprehensif mengenai teori, konsep dan penelitian terdahulu.

2.1.1 Teori Pertahanan Negara

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa

dari segala bentuk ancaman. Kebutuhan untuk melindungi bangsa dan wilayah kedaulatan ini tercermin dari pendapat yang ditulis oleh Bateman and Riley (2016:4), “...*Of course the argument can be advanced that national defence accords with the needs and wishes of the community and society at large and that a major presence of the services in one settlement as a small price to pay for the nation’s safety*”.¹⁷

Oleh karena itu pertahanan negara ini berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah sebagai satu kesatuan pertahanan.¹⁸ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana pertahanan negara dimaknai sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedudukan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pertahanan adalah suatu kebutuhan nasional yang utama.

Sistem pertahanan negara yang diatur menurut UU No. 3 Tahun 2002 ialah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan juga memiliki keterikatan dengan domain militer dan juga perang, namun seiring perkembangannya pertahanan ini dikembangkan menjadi suatu bidang keilmuan yang disebut ilmu pertahanan.

Dalam bukunya tentang Ilmu Pertahanan Makmur Supriyanto juga mendefinisikan bahwa ilmu pertahanan sebagai suatu ilmu yang

¹⁷ Bateman, Michael and Raymond Riley, *The Geography of Defense*, New York:Routledge, 2016

¹⁸ Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008

mempelajari bagaimana kemampuan mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang dan setelah perang untuk menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri baik berupa ancaman militer dan non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka untuk mewujudkan keamanan nasional.¹⁹

Ilmu pertahanan ini juga menjadi dasar dalam mempelajari dan menjalankan setiap kebijakan pertahanan negara dalam mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara. Kemudian secara lebih lanjut juga ilmu pertahanan dalam upaya untuk mewujudkan keamanan nasional yang nantinya memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pertahanan negara. Selain itu juga ilmu pertahanan ini dalam hubungan internasional juga dimaksudkan dalam penciptaan hubungan antarnegara yang damai dan dinamis. Interaksi tersebutlah yang menjadikan ilmu pertahanan berkontribusi dalam terwujudnya suatu keamanan internasional dan menguntungkan pertahanan sebuah negara.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa perlu strategi dengan memperhatikan pola pada perkembangan lingkungan strategis. Sistem pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi.²⁰

¹⁹ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014

²⁰ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, hal. 28

Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan guna menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Adapun pendayagunaan lapis pertahanan militer ini kemudian diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer. Sedangkan Pertahanan non militer merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman non militer. Lapis pertahanan non militer ini tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang nantinya mencakup penanganan bencana alam, operasi sosial dan kemanusiaan dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan sebagainya.

Inti pertahanan non militer adalah pertahanan secara non fisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi yang dilakukan melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari dua jenis pertahanan tersebut, muhibah KRI Dewa Ruci merupakan aspek pertahanan non militer, memang pada praktiknya aktor yang menjadi kegiatan tersebut ialah militer karena penggunaan kekuatan cadet Taruna Angkatan Laut tingkat III namun misi yang dibawa pada muhibah tersebut ialah lebih ke pertahanan dalam aspek budaya.

Hal ini ditujukan pada aktivitasnya dalam muhibah KRI Dewa Ruci ini melalui parade kebudayaan tari-tarian dan kesenian daerah Indonesia yang dijalankan oleh cadet Taruna AL tingkat III. Tujuan pertahanan non militer ini ialah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan menjaga kekayaan budaya Indonesia dengan cara tetap melestarikannya. Melalui muhibah KRI Dewa Ruci yang dijalankan oleh cadet taruna tingkat III ini diharapkan taruna tersebut menjadi diplomat dengan mengemban misi diplomasi untuk kepentingan nasional Indonesia. Keterlibatan TNI

Angkatan Laut dalam festival atau acara internasional lainnya tidak hanya mencerminkan upaya pelaksanaan diplomasi pertahanan tetapi juga kebudayaan.

2.1.2 Teori Diplomasi

Dalam menganalisa bagaimana diplomasi yang digunakan dalam kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci dianalisis melalui teori utama yaitu diplomasi. Diplomasi mempunyai peran yang beragam utamanya dalam hubungan internasional dan politik internasional. Dalam menjalankan hubungan antar masyarakat yang terorganisasi, diplomasi telah memainkan peranan besar dalam mengatur kebijakan-kebijakan internasional. Mengacu pada Hans Morghenthau, bahwa politik internasional adalah pertarungan untuk kekuatan.²¹ Kekuatan politik adalah sarana untuk mencapai tujuan suatu bangsa.

Sehingga kebijakan luar negeri ditempuh oleh para diplomat untuk kekuatan nasional di masa damai dan strategi taktik militer oleh pemimpin militer untuk kekuatan nasional di masa perang.²² Salah satu faktor yang menciptakan kekuatan suatu bangsa adalah kualitas diplomasi.²³ Kualitas diplomasi merupakan salah satu elemen kekuatan nasional yang kemudian akan menentukan tercapai atau tidak suatu kepentingan nasional suatu negara. Salah satu tujuan daripada diplomasi itu sendiri ialah mempromosikan kepentingan nasional dengan cara damai. Berikut ada 4 tugas diplomasi itu sendiri menurut Hans J Morghenthau: *Pertama*, diplomasi harus menentukan tujuannya dikaitkan dengan kekuatan aktual dan potensial yang tersedia untuk mengejar tujuan tersebut. *Kedua*, diplomasi harus menilai tujuan bangsa-bangsa lain dan kekuatan aktual

²¹ Hans J. Morghentau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, Revised, New York: Alfred Knoph, 1973, Hal.29

²² *Ibid.*, Hal. 146

²³ *Ibid*

dan potensial yang tersedia untuk mengejar kepentingan mereka. *Ketiga*, diplomasi harus menentukan sejauh mana tujuan-tujuan yang berbeda tersebut sepadan satu sama lain. Kemudian *keempat*, diplomasi harus menggunakan sarana-sarana yang tepat untuk mengejar tujuannya.

Definisi terkait diplomasi itu sendiri terdiri dari berbagai pendapat menurut para pakar, salahsatunya ialah menurut KM Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* yang menjelaskan diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Definisi ini peneliti ambil karena apabila ditinjau dari konteks hubungan internasional utamanya dalam kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci di setiap kegiatan kunjungan di negara sahabat diplomasi menjadi instrumen kunci, utamanya dalam membawa kepentingan nasional Indonesia.

Pasca perang dunia, situasi hubungan internasional mengalami perubahan. Hingga kemudian konsep diplomasi terus mengalami perkembangan hingga saat ini yakni dikenal dengan diplomasi tradisional dan diplomasi modern. Diplomasi tradisional erat kaitannya dengan kegiatan kenegaraan dan aktor nya yakni negara yang mencakup juga perwakilannya. Topik bahasan pada diplomasi tradisional secara umum hanya berfokus pada perdamaian, keamanan dan penyelesaian konflik. Hal ini juga sejalan dengan proses diplomasinya yang dilakukan berdasarkan pada protokoleran negara yang rigid. Sedangkan pada diplomasi modern terdapat perkembangan yang membuat cakupan diplomasi ini menjadi semakin luas, hal ini ditandai dengan aktor diplomasi tidak hanya sebatas oleh negara melainkan juga aktor seperti organisasi, badan usaha, pebisnis, kelompok kepentingan bahkan individu. Topik bahasan yang dilakukan pada diplomasi modern ini juga meluas tidak hanya mencakup masalah keamanan saja namun juga ke berbagai sektor misalnya pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya.

Sehingga melalui beberapa pakar diplomasi yang melihat bahwa diplomasi mengalami perkembangan dimana pola hubungan internasional yang pada masa tradisional lebih *state-centris* menjadi semakin tidak memadai dalam mengakomodasi masalah-masalah yang timbul dan banyak bukti bahwa selain negara ada aktor lain yang bisa membawa hubungan antar negara dewasa ini. Montville juga mendefinisikan track kedua diplomasi atau *second track diplomacy* sebagai bentuk diplomasi lain selain aktor negara dengan merumuskan bahwa:

second track diplomacy is "unofficial, informal interaction between members of adversary groups or nations that aim to develop strategies, to influence public opinion, organize human and material resources in ways that might help resolve their conflict".²⁴

Hal ini dimaksudkan bahwa diplomasi track ke dua ini dilaksanakan oleh aktor non-negara baik oleh organisasi maupun individu profesional demi mencapai resolusi konflik dan mengelola konflik-konflik internasional. Kemudian Diamond dan McDonald pun melihat trek-trek diplomasi menjadi lebih dari sekedar *first* dan *second track*. Mereka mengembangkan bentuk diplomasi lain dalam rangka memperkuat jalan resolusi konflik dengan bentuk-bentuk diplomasi lain yang dikenal dengan *multi track diplomacy*.

Pada Multi-track diplomacy, terdapat sembilan trek yang merupakan sebuah hal yang saling berkaitan dalam sebuah sistem demi tercapainya perdamaian dunia. Kesembilan trek tersebut antara lain;²⁵

1. Pemerintah atau penciptaan perdamaian lewat diplomasi;
2. Non-pemerintah atau penciptaan perdamaian lewat resolusi konflik;
3. Bisnis atau penciptaan perdamaian lewat perdagangan,;
4. Private citizen atau penciptaan perdamaian lewat keterlibatan individu;

²⁴ Montville J, *Track Two Diplomacy: The Arrow and the Olive Branch*, The Psychodynamics of International Relations, 1991, hal. 162

²⁵ Diamond, L, & McDonald, J.W, *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*. West Hartford, CT: Kumarian Press, 1996, hal. 4

5. Melakukan penelitian, pelatihan, dan pendidikan atau penciptaan perdamaian lewat pembelajaran;
6. Aktivisme atau penciptaan perdamaian melalui pembelaan;
7. Agama atau penciptaan perdamaian adanya iman dalam setiap aksi;
8. Pendanaan atau penciptaan perdamaian lewat penyediaan dana;
9. Media dan komunikasi atau penciptaan perdamaian lewat informasi;

Perkembangan dari berbagai track diplomasi ini juga menunjukkan bahwa adanya kompleksitas konflik yang membutuhkan suatu pendekatan secara multidimensional agar dapat terselesaikan dengan baik dan efektif. Kemudian sarana diplomasi dari adanya multitrack ini juga lebih luas untuk mencapai suatu kepentingan tertentu, karena tidak ada satu track yang dapat dijalankan secara sendiri untuk mencapai keberhasilan, dibutuhkan beragam kerjasama diplomasi lainnya.

Teori Diplomasi ini ditujukan sebagai *grand theory* pada penelitian ini, karena kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci dalam melintasi pelayarannya melewati dan transit di berbagai Negara sahabat. Sehingga dalam setiap kegiatannya diplomasi diperlukan utamanya dalam menjalin hubungan bilateral dan negosiasi lainnya demi mencapai suatu tujuan nasional Negara Indonesia. Terlebih cadet taruna AL tingkat III yang melakukan muhibah tersebut sebagai agen diplomasi atau diplomat karena telah membawa misi Indonesia ke negara sahabat.

2.1.3 Konsep Diplomasi Pertahanan

Perkembangan lingkungan strategis dan definisi keamanan (*security*) yang semakin meluas juga turut memberi perkembangan ilmu diplomasi. Menurut beberapa ahli *security* diartikan sebagai bukan saja bagaimana kapabilitas militer yang mampu membendung kekuatan dari pihak lain, melainkan ketika sebuah negara mampu memiliki pilihan yang multi dimensi dalam menghadapi setiap ancaman yang ada baik tradisional

maupun non-tradisional.²⁶ Selanjutnya *security* dari dimensi non-militer belakangan didefinisikan oleh Buzan dalam bukunya yang memiliki banyak dimensi baik ekonomi maupun lingkungan ada juga *societal security*, yang diimplementasikan dalam *societal security referred to the sustainable development of traditional patterns of language, culture, religious and national identities and customs of states*.²⁷

Definisi keamanan yang semakin luas dari pada sekedar militer seperti bahasa, budaya, dan identitas nasional seperti yang dijelaskan Buzan dan Ullman ini juga mendorong dalam penciptaan bentuk kerja sama. Wujud kerjasama ini diharapkan mampu menjadikan perspektif yang lebih luas misalnya dalam muhibah KRI Dewa Ruci sebagai unsur keamanan juga, khususnya keamanan dalam bidang budaya sebagai suatu usaha untuk mempertahankan budaya Indonesia dalam setiap kunjungannya ke negara sahabat maupun pertahanan dan keamanan dalam bentuk lain. Perkembangan konsep pertahanan saat ini bukan hanya untuk militer saja namun lebih luas, seperti ekonomi, pangan, lingkungan, dan manusia (*human*) *security*. Hingga kemudian konsep mengenai diplomasi dan pertahanan juga tidak dapat dipisahkan sehingga muncul istilah diplomasi pertahanan.

Hal ini dirasa mengingat bahwa kompleksitas dan multidimensional ancaman yang ada sehingga diplomasi pertahanan dapat dijadikan instrumen untuk membangun rasa pengertian dan transparansi antar negara dengan semangat saling percaya. Diplomasi Pertahanan merupakan terminologi baru dalam hubungan internasional. Terminologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Pemerintah Inggris dalam *British Government's Strategic Defence Review* 1998. Diplomasi pertahanan adalah penggunaan personel militer, termasuk *service attaches*, dalam

²⁶ Richard H. Ullman, *Redefining Security*, International Security, Vol. 8 No.1: MIT Press, 1983.

²⁷ Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for Security Analysis in the Post-Cold War Era*, Brighton: Weatsheat, 1991

mendukung pencegahan dan resolusi konflik, termasuk menyediakan bantuan dalam pembangunan angkatan bersenjata yang demokratis dan akuntabel.²⁸

Pendapat lain menurut Cottey dan Foster juga mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai suatu kegiatan yang menggunakan kekuatan militer di masa damai serta adanya penggunaan infrastruktur terkait seperti menteri pertahanan sebagai instrumen kebijakan luar negeri maupun kebijakan keamanan.²⁹ Diplomasi pertahanan ini melihat bagaimana kemudian pihak-pihak militer melihat dan terlibat dalam kerja sama ini perlu diberi perhatian sehingga ini akan sama seperti diplomasi pertahanan yang dijabarkan oleh Rodon Pedrason, diplomasi pertahanan dijelaskan:

'all methods and strategies used by countries that may be in a state of competition with one another, but they have used a certain kind of practice including economic, culture, political cooperation, defence cooperation and diplomacy to make friends, hopefully cooperate with one another, and, most importantly, to build and increase mutual trust'.³⁰

Definisi dari diplomasi pertahanan kemudian menjadi rujukan bagaimana pemenuhan penelitian ini dibedah dalam rangka konsep pertahanan. Baik dari perspektif keamanan, maupun dari perspektif diplomasi, penelitian ini memiliki scope yang luas namun dengan perspektif pertahanan ini akan menjadi terarah pada bagaimana peran militer dalam kerja sama ini, ataupun bagaimana harusnya militer melibatkan diri, atau jika mampu, bagaimana militer kemudian mampu masuk dalam ruang kerja samanya

²⁸ Berridge, G. R., James, Alan, *Dictionary of Diplomacy; Second Edition*, New York: Palgrave Macmillan, 2003

²⁹ Andrew Cottey., Anthony Forster, *Reshaping Defense Diplomacy : New Roles for Military Cooperation and Assistance*, New York : Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 2004

³⁰ Rhodon Pedrason, *ASEAN's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community?*, Heidelberg: Universitat Heidelberg, 2015

ataupun kepentingan pertahanan mampu menjadi bagian pertimbangan dalam perjanjian ini.

Secara lebih komprehensif menurut Cottey dan Forster diplomasi pertahanan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya:³¹

- a. Kontak bilateral dan multilateral antara militer senior dan pejabat sipil kementerian pertahanan;
- b. Penunjukkan atase pertahanan ke luar negeri;
- c. Perjanjian kerjasama pertahanan bilateral;
- d. Pelatihan personel militer dan pegawai sipil dari kementerian pertahanan asing;
- e. Penyediaan tenaga ahli dan nasihat dalam kontrol demokratis dari angkatan bersenjata, manajemen pertahanan, dan lingkup teknis militer;
- f. Kontak dan pertukaran antara personel atau unit militer dan kunjungan kapal-kapal;
- g. Penempatan personel militer atau sipil di kementerian pertahanan atau angkatan bersenjata negara mitra;
- h. Pengerahan tim untuk latihan;
- i. Penyediaan perlengkapan militer dan bantuan material lainnya;
- j. Latihan militer secara bilateral maupun multilateral.

Dalam menghadapi ancaman militer, Indonesia memiliki strategi pertahanan defensif aktif dengan mengedepankan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara. Diplomasi Pertahanan juga merupakan aktivitas kerjasama yang dilakukan militer dan infrastruktur terkait saat masa damai. Pada diplomasi pertahanan ini isunya lebih luas seperti peran militer sampai peran non militer misalnya penjaga keamanan (*peacekeeping*), penegak keamanan (*peace enforcement*), mempromosikan *good governance*, tanggap bencana, serta perlindungan

³¹ *Ibid*

hak asasi manusia.³² Kemudian, diplomasi pertahanan ini merupakan segala bentuk metode dan strategi yang digunakan oleh negara-negara yang bersaing satu sama lain, tetapi negara-tersebut melakukan segala bentuk praktek yang berhubungan dengan ekonomi, budaya, kerjasama politik dan pertahanan serta diplomasi untuk dapat memiliki hubungan yang baik harapannya untuk dapat bekerjasama satu sama lain demi meningkatkan rasa saling percaya³³.

Faktor budaya juga merupakan salahsatu elemen dalam mengaplikasikan diplomasi Pertahanan. Seperti yang dilakukan oleh KRI Dewa Ruci yang membawa misi promosi Budaya Indonesia dalam setiap muhibahnya di negara-negara yang akan di singgahinya. Muhibah KRI Dewa Ruci bukan pertama-tama perlu dilihat dalam konteks pertahanan tetapi juga budaya. Melalui pengiriman KRI Dewa Ruci ini TNI Angkatan Laut membawa serta budaya Indonesia di mata internasional. Diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh kapal latih taruna TNI Angkatan Laut ini terealisasikan dalam berbagai aktivitas budaya yang dipertunjukkan oleh para taruna di hadapan masyarakat internasional saat kapal tersebut singgah di pelabuhan negara lain. Singkatnya, kapal KRI Dewa Ruci tidak hanya menjadi perwakilan pertahanan Indonesia di mata dunia tetapi juga telah menjadi “wajah” atau duta keliling kebudayaan Indonesia. Adanya kegiatan di atas, bisa kita lihat bagaimana TNI Angkatan Laut mencoba untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dalam konteks diplomasi pertahanan.

Pada perkembangannya muhibah oleh KRI Dewa Ruci ini juga sekaligus untuk meningkatkan *Confidence Building Measures* (CBM) Indonesia dengan negara sahabat yang dikunjungi oleh KRI Dewa Ruci. Konsep CBM itu sendiri merupakan bagian daripada diplomasi

³² NADI. Chairman's Report of the Track II Network of ASEAN Defense and Security Institutions (NADI) Workshop on Defense Diplomacy, Bali: Indonesia Defense University. 2015

³³ Rhodon Pedrason, loc.cit

pertahanan. CBM disini dibedakan menjadi dua yakni CSBM (*Confidence Security Building Measures*) dan *non-military Confidence Building Measures* (CBM).³⁴ Pada *non military* CBM ini didefinisikan sebagai sekumpulan aksi dan proses dalam fase konflik dan melibatkan negara dan dimensi-dimensi keamanan dalam bidang ekonomi, politik, lingkungan, sosial dan budaya dimana bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan tingkat kepercayaan antara dua pihak atau lebih yang berkonflik.

Kemudian, CSBM ini juga bertujuan pula untuk mencegah pecahnya konflik, meningkatkan ketegangan dalam negara dan dengan negara lain serta membuka usaha penyelesaian suatu konflik secara damai dan berkelanjutan.³⁵ CBM lebih dikenal dengan CSBM dimana menitikberatkan pada masalah *hard security* misalnya pertukaran informasi militer, transparansi kapabilitas militer dimana ditujukan untuk mengurangi risiko serangan militer salah satu blok terhadap blok militer lainnya. Misalnya disaat perang dingin CBM ini digunakan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sumber-sumber yang mempengaruhi hilangnya kepercayaan, memunculkan ketakutan dan tindakan yang juga mengancam serta meningkatkan ketegangan yang dapat terjadi antara NATO dan negara-negara Pakta Warsawa. Tahun 1970 muncul adanya *non-military* CBM dimana bertujuan untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan baik dalam situasi krisis dan konflik dengan melibatkan aktor melalui interaksi antar masyarakat, warga sipil, jurnalis, ekonom, dan lainnya.³⁶

Secara lebih lanjut adanya CBM ini juga dapat memberi kemajuan dalam sebuah hubungan, memanusiaikan pihak-pihak, memberikan

³⁴ OSCE Conflict Prevention Centre, *Guide on Non Military Confidence Building Measures (CBMs)*, Vienna: Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE) Secretariat. 2012

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

komitmen yang positif serta mencegah adanya eskalasi konflik. Tujuan penting dari adanya CBM ini tidaklah membuat masing-masing pihak untuk saling menyukai atau mencari akar permasalahan namun lebih terhadap pembentukan kelompok kerja bersama yang dapat dipercaya bisa membuat suatu isu lebih mudah. Pada prinsipnya CSBM dan non military CBM memiliki tujuan yang sama dan dapat digunakan bersama dalam membangun tingkat kepercayaan antara masyarakat dimana mengurangi perasaan terancam. Berikut merupakan objektifikasi dari penggunaan CBM:³⁷

- a. Mencegah meningkatnya eskalasi; dimana CBM dapat digunakan untuk mencegah adanya peningkatan suatu eskalasi konflik walaupun tidak disertai dengan proses negosiasi dalam jangka pendek.
- b. Menginisiasikan dan memperdalam proses negosiasi; negosiasi itu sendiri terdiri dari sebuah proses pembuatan keputusan dan menyusun strategi dalam mencapai hasil-hasil yang dapat diterima masing-masing pihak. Sehingga dibutuhkan keberanian dalam pengambilan resiko dalam menyikapi sebuah konflik serta kemudian dibutuhkan pula tingkat kepercayaan minimum yang digunakan negosiasi untuk dapat dimulai dan juga dikembangkan.
- c. Mengkonsolidasikan proses dan hasil akhirnya ialah kebutuhan CBM untuk dapat membantu implementasi perjanjian.

Secara umum, terdapat 4 bidang utama yang bisa dipraktikkan dalam CBM diantaranya:³⁸

³⁷ Simon JA Mason dan Matthis Siegfried, *Confidence Building Measures (CBMs) in Peace Processes: A Handbook for AU Practitioners-Process related question*, Vol.1. African Union and the Centre for Humanitarian Dialogue, 2013

³⁸ Holly Higgins. *Applying Confidence-Building Measures in a Regional Context*, makalah dipresentasikan dalam Building Nuclear Confidence on the Korean Peninsula: International Workshop, Institute for Science and International Security. Washington DC. 2001

1. Komunikasi, terbukanya jalur komunikasi antara negara yang rawan konflik dapat membantu mengaburkan ketegangan atau memberikan mekanisme yang lebih konsultif dan solutif
2. Pembatasan, menentukan perhitungan batasan bertujuan untuk menjaga jenis dan tingkat perlawanan dan penentuan batas area perlawanan
3. Transparansi, dapat meliputi ketentuan pemberitahuan dini, pertukaran data, dan observasi
4. Verifikasi, mengkonfirmasi seberapa jauh suatu negara bekerja sama dalam mengimplementasi sebuah perjanjian yang sudah disepakati.

Adapun keberhasilan daripada implementasi CBM ini adalah keduabelah pihak percaya bahwa mengurangi ketidakpastian, menghindari kecelakaan yang dapat memicu konflik, dan membuat hubungan menjadi lebih dapat diprediksi, dan merupakan bagian daripada kepentingan negara mereka.³⁹ CBM ini juga dalam muhibah KRI Dewa Ruci juga diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih baik kepada negara sahabat, kemudian diharapkan dengan adanya muhibah juga dapat memberikan jalur komunikasi sehingga dapat mengaburkan potensi risiko ketegangan sekaligus meningkatkan kepercayaan diantara kedua negara.

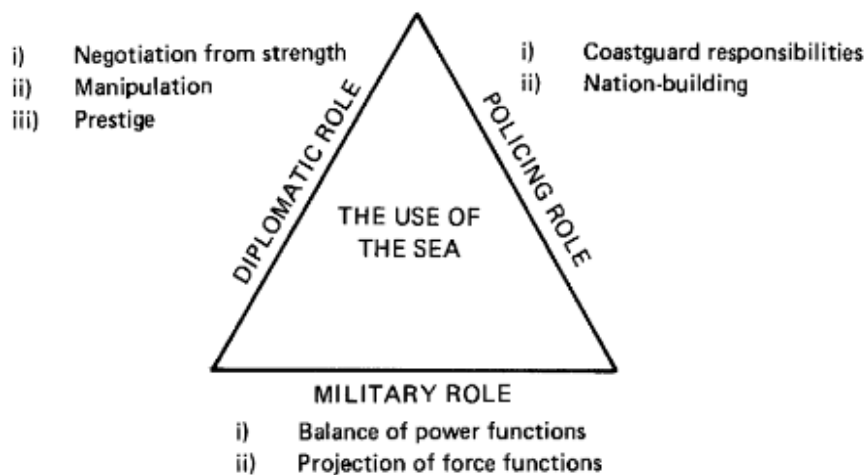
2.1.4 Diplomasi Angkatan Laut

Dalam teori peran universal Angkatan Laut, Ken Booth dalam bukunya *navies and foreign policy* menyatakan bahwa pada umumnya negara menggunakan potensi laut ialah untuk mencapai beberapa tujuan yakni sebagai media untuk perpindahan baik itu barang dan manusia, kemudian untuk membangun kekuatan militer sekaligus dalam rangka menjalankan misi diplomasi dan pemanfaatan sumber daya laut. Adanya

³⁹ Yanyan Mochammad Yani, Ian Montratama dan Emil Mahyudin, Pengantar Studi Keamanan, Jakarta: Intrans Publishing, 2017

pendekatan ini kemudian Booth menyarankan bahwa Angkatan Laut memiliki 3 fungsi utama yaitu militer, diplomasi dan polisionil.⁴⁰ Secara universal peran hakiki daripada Angkatan Laut ialah sebagai kekuatan militer yang ditujukan untuk mampu melaksanakan pengendalian wilayah (*sea control*) dan menangkal serangan musuh dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara di laut.

Pada perkembangannya Angkatan Laut pun mempunyai peran seperti yang dijelaskan oleh Ken Booth dalam bukunya tersebut dimana teori ini menyatakan bahwa peran angkatan laut berkembang dari awalnya *use of the sea* namun peran tersebut dapat didefinisikan melalui tiga trinitas yaitu gagasan berupa: fungsi militer, diplomasi serta polisionil.⁴¹ Dalam menjalankan trinitas fungsi dan peran Angkatan Laut, maka perancang strategi Angkatan Laut harus dapat mengkestraksi suatu kebijakan dari seorang pemimpin menjadi komposisi yang sesuai dengan komposisi trinitas fungsi tersebut. Adapun fungsi tersebut seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Trinitas Fungsi Angkatan Laut
Sumber : Ken Booth,1977:Hal.17

a. Fungsi Militer

⁴⁰ Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*, London: Croom Helm, Ltd, 1977

⁴¹ *Ibid*

Dalam memainkan fungsi dan peran militer, disini Angkatan Laut mengacu pada penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi ancaman. Dalam hal ini Angkatan Laut juga harus mampu melakukan pencegahan dan postur pertahanan konvensional baik itu di masa perang maupun damai. Sehingga harus dapat juga menjalankan pengendalian laut (*sea control*) untuk mencapai misi yang ditetapkannya. Penggunaan kekuatan Angkatan Laut dalam peran militer ini juga berkaitan erat dengan perang dan operasi tempur dan konsekuensi daripada negara yang menyatakan dirinya memiliki *military role* harus memiliki kekuatan tempur dan kemampuan dalam menghadapi situasi tempur. Kemudian Angkatan Laut juga harus memiliki kemampuan *sea control* dan *sea denial* dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk kesiapan perang, serta menangkal setiap ancaman militer melalui laut, dan turut menjaga stabilitas keamanan maritim. Ada juga fungsi alamiah Angkatan Laut yang terdiri dari *strategic nuclear deterrence, conventional deterrence and defense, extended deterrence and defense* serta *international order*. Pada sebagian negara mengadopsi konsep deterrence tanpa adanya komponen nuklir sehingga pendekatan yang dilakukan berdasarkan metode *conventional deterrence*. Kepentingan negara dan kemampuan angkatan merupakan penentu utama bagi konsep deterrence. Beberapa negara akan lebih memiliki kepentingan yakni untuk menantang penggunaan laut kearah positif karena memiliki tujuannya sendiri.

b. Fungsi Polisionil

Dalam teorinya Ken Booth menjelaskan bahwa dalam menjaga ketertiban laut di wilayah laut territorial di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina seluruh kewenangan diberikan kepada institusi sipil yaitu *Coast Guard*. Pada penjelasan ini bahwa institusi sipil diberikan kewenangan dalam menjaga kedaulatan, mengawasi pemanfaatan sumberdaya laut dan kemudian juga turut dalam menjaga keamanan dan

ketertiban di laut. Namun, di beberapa negara di dunia yang tidak memiliki institusi sipil dengan kapabilitas yang memadai, kekuatan Angkatan Laut ini dapat melakukan support kepada institusi sipil untuk mengelola ketertiban laut di wilayah teritorialnya yakni melalui konsep *Peaceful Uses of Military Forces* (PUMF) dan *Military Assistance to the Civil Community* (MACC).

c. Fungsi Diplomasi

Adapun fungsi diplomasi terdapat tiga peran dan objektif dari Angkatan Laut yaitu *negotiation from strength*, *manipulation* serta *prestige*. Konsep daripada fungsi diplomasi Angkatan Laut sangat berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara karena Angkatan Laut merupakan fase yang pertama dilakukan untuk menghindari benturan senjata antar aktor negara. Kemudian apabila fase pertama ini tidak efektif maka selanjutnya Angkatan Laut dapat melaksanakan fungsi militer yang bersifat koersif. Peran diplomasi ini juga dimaksudkan untuk menghadapi ancaman baik itu dari luar dan dalam negara, serta mampu menerapkan negosiasi yang bertujuan untuk memperoleh *power bargaining position* dan menjaga reputasi atau citra bagi negara tersebut.

Secara lebih jauh Ken Booth juga menjelaskan bahwa peran dan tugas daripada Angkatan Laut dimasa mendatang adalah :

1. *War at Sea* yaitu melaksanakan perang di laut
2. *Deterrence at Sea* yaitu sebagai penangkal ancaman
3. *Power Projection* yaitu proyeksi kekuatan ke darat
4. *Coercive Naval Diplomacy* yaitu lebih menekankan kepada patroli-patroli laut
5. *Cooperative Naval Diplomacy* yaitu merupakan kerjasama militer Angkatan Laut untuk meningkatkan solidaritas internasional

Teori Ken Booth ini juga selaras dengan misi yang diemban oleh setiap muhibah KRI Dewa Ruci ini yakni misi diplomasi. Dari tiga trinitas ini misi diplomasi oleh peran TNI AL melalui KRI Dewa Ruci ini dapat juga

menciptakan citra sekaligus opini publik bagi Indonesia utamanya melalui TNI Angkatan Laut dalam eksistensinya di mata dunia Internasional dalam hal peningkatan *capacity building* dan penciptaan *confidence building measures*.

Penggunaan kekuatan laut dalam mendukung politik luar negeri tidak dengan menggunakan senjata, tetapi kekuatan laut ini digunakan sebagai suatu isyarat atau pesan. Penggunaan kekuatan laut ini dapat dilakukan dengan pesan/isyarat mengkomunikasikan niat suatu negara, menegosiasikan masalah bilateral dua negara, menyampaikan pesan kekuatan militer suatu negara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh bargaining power yang lebih baik untuk menciptakan pembentukan pengaruh suatu negara terhadap negara lain baik pada masa damai maupun perang.

Dalam masa damai dilakukan dalam bentuk misalnya kunjungan kapal perang ke suatu negara. Diplomasi Angkatan Laut dikatakan sebagai penggunaan kapal perang untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu negara dengan yang lebih soft bukan dengan kekerasan. Pada intinya adalah komunikasi yaitu dengan cara bernegosiasi dengan menunjukkan kemampuan yang kita miliki yang lebih dikenal dengan *showing the flag*⁴². Sebaliknya, dalam keadaan perang atau berkonflik maka tindakan diplomasi Angkatan Laut diharapkan dapat memberikan tekanan psikologis terhadap negara lain, sehingga dampaknya kemudian akan menghilangkan niat berkonflik (*hostile intent*) atau tindakan permusuhan (*hostile act*). Diplomasi Angkatan Laut pada saat menghadirkan kekuatan untuk menakuti lawan, bila perlu dapat menghancurkan lawan dengan kekerasan bersenjata yang disebut dengan *Gun Boat Diplomacy*.

⁴² A.Yani Antariksa, Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia dalam Konteks Pergeseran Geopolitik di Kawasan pada Masa Depan, Jurnal Pertahanan Agustus 2014 Volume 4 Nomor 2, 2014

Penggunaan kapal perang sebagai alat diplomasi ini dapat membentuk citra terhadap kekuatan militer dan angkatan laut yang besar, akan mengesankan pemerintah lain dan sekaligus akan dapat mempengaruhi suatu negara. Misalnya penggunaan kapal perang dengan cara *showing the flag*, yang dimaksudkan untuk penciptaan opini terhadap negara lain.

2.1.5 Konsep Soft Power Joseph Nye

Power merupakan hal yang penting di dunia internasional. Dengan memiliki *power*, sebuah negara dapat mendapatkan apa yang diinginkannya. Joseph Nye menjelaskan *power* sebagai *the ability to influence the behaviour of others to get the outcomes one wants*.⁴³ Dalam menjalankan kebijakan luar negeri suatu negara mempertimbangkan aspek *hard power* untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Konsep daripada *hard power* ini ialah seperti penggunaan kekuatan militer atau angkatan bersenjata, melakukan ancaman misalnya mengancam akan melakukan serangan militer atau embargo ekonomi, serta memberikan imbalan misalnya bantuan ekonomi.

Joseph Nye disini menjelaskan bahwa ada cara lain untuk mempraktekkan *power* selain dengan memerintah, memaksa, memberikan imbalan yaitu dengan *attraction* (memikat). Proses *attraction* inilah yang disebut dengan Joseph Nye konsep *soft power*. Nye mendefinisikan *soft power* sebagai *“the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments”*.⁴⁴ Menurut Nye *soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus dengan cara paksaan atau imbalan namun melalui *attraction*. Dalam hal ini, *Power* tidak hanya berupa perintah atau paksaan, namun *power*

⁴³ Joseph S. Nye, Jr, *Public Diplomacy and Soft Power*, Public Affairs: New York, 2008, Hal 94

⁴⁴ *Ibid*

adalah kemampuan untuk membuat pihak lain melakukan hal yang tidak diinginkannya dan dapat menguntungkan kita. Kemampuan untuk membentuk sebuah *attraction* ini cenderung dikaitkan dengan aset-aset yang tak terlihat seperti kepribadian yang menarik, budaya, nilai dan institusi politis, dan kebijakan-kebijakan yang terlihat didasarkan pada hukum yang benar dan memiliki otoritas moral.

Soft power tidak sama dengan pengaruh (*influence*), *influence* bisa didapat dari ancaman dan pembayaran. *Soft power* juga tidak hanya berupa kemampuan untuk berargumentasi sehingga orang lain setuju dengan pendapat kita, tetapi juga sebuah kemampuan untuk menarik (*to attract*). Ketertarikan dapat membuat seseorang meniru orang lain. Jika kita mempengaruhi orang lain tanpa ada ancaman atau syarat pertukaran di dalamnya maka kita sedang menggunakan *soft power*.

Konsep daripada *hard power* dan *soft power* ini saling berkaitan dalam sebuah negara dan menjadi unsur kekuatan nasional suatu negara. Disini peneliti memakai konsep tersebut untuk mencoba menjelaskan keterkaitannya misi TNI Angkatan Laut sebagai salah satu komponen *hard power* negara Indonesia dalam mengemban misi diplomasi melalui muhibah KRI Dewa Ruci melalui *soft power* yakni *attraction* melalui parade budaya dan kesenian yang ditampilkan oleh para kadet Taruna Angkatan Laut saat melakukan muhibah dan sandar di negara sahabat. Upaya yang dilakukan oleh para kadet Taruna Angkatan Laut ini juga sebagai media diplomasi yang sarat dengan misi budaya yang dibawanya.

2.1.6 Tinjauan Konseptual Poros Maritim Dunia

Alfred T Mahan, perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dalam bukunya *the influence of sea power upon history*⁴⁵ mengemukakan teori bahwa *sea power* merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan

⁴⁵ Alfred T Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783*, United States: Little, Brown and Co, 1890

kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut.

Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia pernah mengalami kejayaan di bidang maritim. Hal itu di dapat dari kejayaan dalam bidang maritim. Hal itu dapat diketahui dari adanya masa kejayaan kerajaan-kerajaan maritim yang pernah tampil dalam sejarah Indonesia. Diantara kerajaan-kerajaan itu juga saling berhubungan melalui transaksi perdagangan dan pelayaran perahu. Misalnya Kerajaan Sriwijaya yang berlangsung dari abad 7 sampai 14, dimana kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai hampir semua wilayah perairan di Nusantara antara lain Laut Jawa, Laut Banda, dan sebagian laut di wilayah Indonesia Timur. Di Makassar terdapat kerajaan Gowa dan Talo, kemudian di Jawa terdapat Kerajaan Majapahit yang juga sebagai kekuatan maritim dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah lain di luar Jawa seperti Bali, Sumbawa, Lombok, Madura, Sulawesi dan Pajajaran.⁴⁶

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar sebagai bagian dari Poros Maritim Dunia karena letak geografisnya berada di daerah ekuator, antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudera yakni samudera Pasifik dan Hindia. Mengemukanya istilah poros maritim dunia tersebut tidak terlepas dari gagasan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam pidatonya setelah pelantikan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 20 Oktober 2014 diatas kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa yang berbunyi:

“kita telah terlalu lama memungguni selat dan teluk, dan kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalasveva

⁴⁶ Bernhard Limbong, Poros Maritim, Jakarta:Pusatata Margaretha, 2015, Hlm 27

Jayamahe dilaut justru kita jaya, sebagaimana semboyan kita di masa lalu bisa kembali".

Mencermati pidato tersebut, bangsa Indonesia menyadari bahwa laut merupakan media pemersatu dan sebagai media penghubung antar pulau bahkan penghubung antar negara di dunia. Sehingga seluruh aspek kehidupan dan penyelenggaraan negara perlu mempertimbangkan geosatrategi, geopolitik, geokonomi dan geososial budaya sebagai negara kepulauan. Pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa harus disadari oleh kesadaran ruang maritim tempat kita berada, sehingga visi maritim menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia.

Perlu dipahami pengertian negara maritim, mengingat adanya pandangan meskipun Indonesia memiliki sejumlah kriteria untuk menjadi kekuatan maritim, akan tetapi Indonesia masih belum menjadi negara maritim. Status Indonesia masih sebatas negara kepulauan setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 tanggal 16 November 1994. Berdasarkan doktrin Angkatan Laut yang diterbitkan tahun 2001, penggunaan kata maritim diartikan berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Pengertian lain yang lebih luas yakni selain menyangkut sumber-sumber daya internal di laut juga menyangkut faktor eksternal di laut yaitu pelayaran, perdagangan, lingkungan pantai dan pelabuhan serta faktor strategis lainnya. Kata maritim mengandung arti integrasi/gabungan, dan menunjukkan suatu lingkungan kelautan serta bukan menunjukkan institusi.⁴⁷

Poros maritim pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang berangkat dari kondisi fisik bangsa Indonesia dimana sebagian besar wilayahnya berupa laut. Kemudian, konsep poros maritim sejalan dengan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia dimana

⁴⁷ Laksamana TNI {Purn} Agus Suhartono, "Indonesia Poros Maritim Dunia" Topik Bahasan "Kedaulatan Maritim Indonesia" Presentasi dalam Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional, Bandung: Universitas Padjadjaran, 9-10 Juni 2015

Indonesia dapat menjadi negara maritim karena mempunyai jumlah pulau terbanyak dan salahsatu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. wilayah daratnya berada dalam kesatuan yang dikelilingi laut dan dua pertiga luas wilayahnya berupa laut. Poros maritim juga dapat dianggap sebagai rumusna mendasar untuk kembali menguatkan predikat bangsa bahari. Dalam artian bahwa konsep poros maritim menjadi sebuah visi atau cita-cita mengenai bagaimana bangsa Indonesia dibangun kedepannya. Sehingga gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan yang mengantar bangsa Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu, adil, makmur sejahtera dan berwibawa. Dalam konsep Poros Maritim Dunia ini juga artinya semua elemen kemaritiman harus bersatu mensukseskan kebijakan tersebut.

Unsur-unsur kemaritiman yang sangat kompleks membutuhkan pula diferensiasi terhadap pemilihan aspek mana yang akan menjadi fokus utama. Sehingga untuk mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia melalui 7 pilar Kebijakan Kelautan Indonesia menurut Perpres RI No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia:

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan keselamatan di Laut
3. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut
4. Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan
5. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut
6. Budaya Bahari
7. Diplomasi Maritim

Pada penelitian ini dari 7 pilar yang disebutkan diatas berdasarkan pertanyaan penelitian akan peneliti fokuskan kepada pilar pertama, pilar keenam dan pilar ketujuh.

TNI Angkatan Laut merupakan salahsatu elemen dari kemaritiman disini juga berperan dalam pertahanan di laut yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut ini melalui pembinaan kekuatan potensi maritim. Misalnya dalam menyangkut peminan kekuatan laut dalam menghadapi ancaman non militer misalnya dengan misi muhibah KRI Dewa Ruci oleh TNI Angkatan Laut. Ancaman non militer ini misalnya pengaruh budaya asing yang datang ke Indonesia, sehingga disini melalui muhibah KRI dewa ruci seakan memberikan pesan bahwa Indonesia mempunyai budayanya sendiri, budaya maritim khususnya. Oleh karena itu TNI AL dalam menjalankan perannya di bidang maritim, melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa proyeksi kekuatan TNI AL untuk mengamankan segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

Proyeksi kekuatan TNI AL dalam bentuk operasi-operasi yang dilaksanakan, merupakan kegiatan pengendalian laut. Sarana prasarana pengendalian laut berupa kapal, pesawat udara, radar pantai, pelabuhan dengan segala fasilitasnya, serta komunikasi merupakan unsur utama yang harus dimiliki TNI AL dan institusi bidang kelautan. Kegiatan pelayaran ini juga didukung dengan KRI yang ada. Sedangkan di bidang diplomasinya Indonesia juga perlu menerapkan diplomasi maritim.

Diplomasi maritim adalah salah satu bentuk diplomasi militer yang diperankan oleh TNI AL, dalam rangka *Confidence Building Measures (CBM)*. Oleh karena itu, kegiatan diplomasi maritim yang dilakukan dengan muhibah, patroli terkoordinasi, tugas perdamaian, latihan bersama diharapkan dapat menumbuhkan saling percaya antar negara. diplomasi maritim yang dilakukan TNI AL, bisa berupa pengerahan KRI ke suatu negara, mendukung delegasi Indonesia untuk mengadakan perundingan baik berupa negosiasi atau bentuk kerja sama antar negara yang saling menguntungkan. Kehadiran KRI dalam mendukung delegasi Indonesia di luar negeri sangat membantu proses berhasilnya tujuan yang hendak

dicapai dalam diplomasi maritim. KRI ini juga dalam melaksanakan fungsinya ada dua yakni *combatant* dan *non combatant*. KRI Dewa Ruci ini termasuk dalam kapal latihan yang bersifat non combatant.

2.1.7 Implementasi Kebijakan

Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan dideskripsikan terlebih dahulu mengenai implementasi kebijakan menurut pendapat beberapa ahli. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang menjadi objek dari kebijakan, oleh karenanya tidak berlebihan apabila implementasi kebijakan termasuk aspek penting sebagaimana yang disampaikan oleh Wahab yakni *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jackets unless they are implemented”*.⁴⁸ Dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa implementasi kebijakan berhubungan erat dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, maka di dalam implementasi itu sendiri terdapat keputusan-keputusan yang menjadi pola operasional yang harus dijalankan oleh para pelaksana (implementor) dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya (politik, ekonomi, sosial, maupun budaya).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Kiviniemi bahwa: *“Public policy implementation is usually a complex process. It often take years, and it involves several different groups of actors at different groups of actors at its different stages. The real situation of implementation structures varies dynamically, with changing groups of implementors, opponents, and*

⁴⁸ Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016

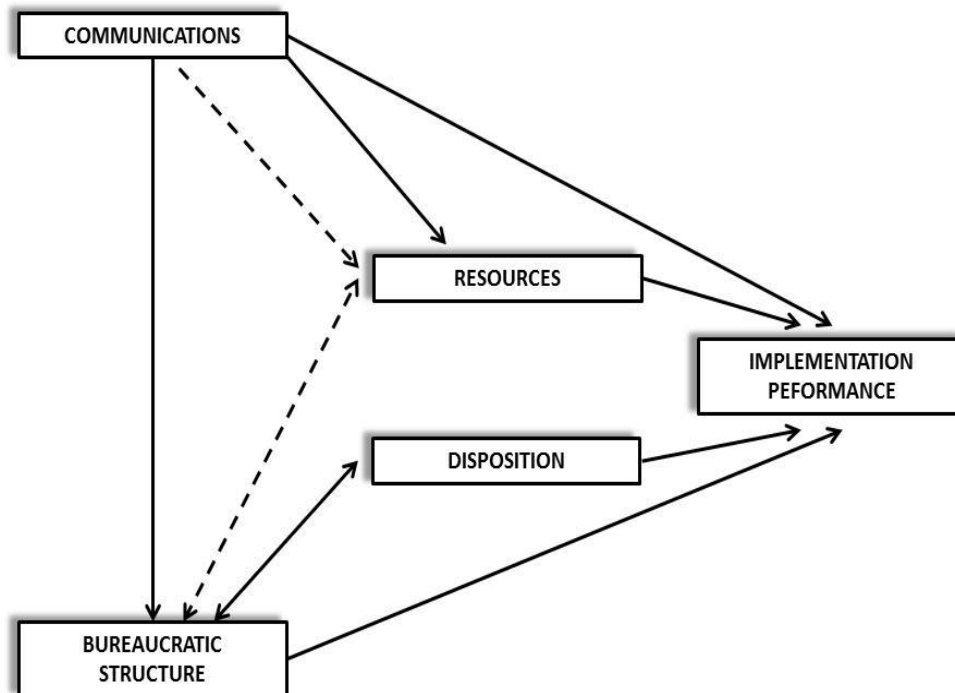
*outsiders, and these groups cross the institutional boundaries of public agencies and of the public and private spheres”.*⁴⁹

Dari pendapat tersebut, implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak baik dari lingkup pemerintahan maupun dari luar termasuk masyarakat. Struktur dari implementasi kebijakan publik memiliki sifat yang sangat dinamis karena tergantung pada banyak aspek, oleh karenanya diperlukan suatu pemahaman tersendiri terkait implementasi kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai model Edward III dalam proses implementasi kebijakan. Menurut model ini, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila empat isu pokok yang berpengaruh yaitu *communication, resources, disposition or attitude, dan bureaucratic structures* dilaksanakan dengan baik.⁵⁰ Karena kenyataannya, di beberapa negara implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik dan kebanyakan disebabkan kurangnya perhatian terhadap ke-empat isu tersebut. Menurutnya, ke empat faktor tersebut saling mempengaruhi secara simultan baik untuk membantu maupun menghambat implementasi kebijakan dan digambarkan sebagai berikut:

⁴⁹ Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* Yogyakarta:Penerbit Gava Media, 2015

⁵⁰ Winarno, Budi, *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Jakarta:PT. Buku Seru, 2014



Gambar 2.2. Implementasi Kebijakan Model Edward III

Sumber: Mulyadi, 2016,hal.69

- 1) Komunikasi. Secara umum Edward III menyampaikan ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Yang dimaksud dengan **transmisi** adalah, setiap pembuat kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan yang dibuat dan perintah untuk melaksanakan keputusan tersebut yang telah dikeluarkan. Hambatan yang kerap terjadi dalam proses ini antara lain adanya pertentangan pendapat antara pelaksana dan pengambil keputusan, informasi yang akan disampaikan melewati birokrasi yang rumit dan berlapis, dan adanya persepsi yang keliru dari para pelaksana (implementor). Sedangkan yang dimaksud dengan **kejelasan** adalah, untuk menghindari terjadinya interpretasi yang keliru dengan keputusan yang ditetapkan di awal. Menurutnya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan antara lain

kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, adanya masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, dan menghindari pertanggungjawaban kebijakan. **Konsistensi** merupakan hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi kebijakan, karena ketidakkonsistenan komunikasi akan berakibat pada adanya penafsiran yang keliru dari para pelaksana dan ketidakefektifan implementasi kebijakan;

- 2) Sumber-sumber. Edward III mendefinisikan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan antara lain staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. **Staf** menjadi hal yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan, karena komposisi staf secara kuantitas tidak berbanding lurus dengan efektifitas dari implementasi kebijakan akan tetapi yang lebih diperhatikan adalah kualitas dari staf yang ada. Sedangkan untuk **informasi** yang dimaksud adalah petunjuk atau panduan yang jelas tentang kebijakan yang akan diimplementasikan, karena ketidakjelasan informasi yang diterima akan berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Sumber berikutnya adalah **wewenang**, yang memiliki bentuk dan program yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karenanya, harus dipahami terlebih dahulu kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal sebelum menjalankan wewenang;
- 3) Disposisi atau kecenderungan. Yang menjadi penekanan terkait dengan disposisi atau kecenderungan adalah watak dan karakter dari para implementor (komitmen, kejujuran, dan sifat terbuka). Faktor ini berperan penting dalam menilai kesiapan dari pihak-pihak implementor dalam menjalankan misinya, agar tidak terjadi sebagaimana yang diistilahkan oleh Edward III adanya implementor yang masuk dalam “zona ketidakacuhan”; dan

- 4) *Bureaucratic structures*. Birokrasi diartikan sebagai badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja (*Standart Operating Procedures/SOP*) dan fragmentasi. SOP lebih menekankan pada penataan untuk internal dari birokrasi sedangkan fragmentasi merupakan penataan yang bersumber dari kondisi dan tekanan eksternal.

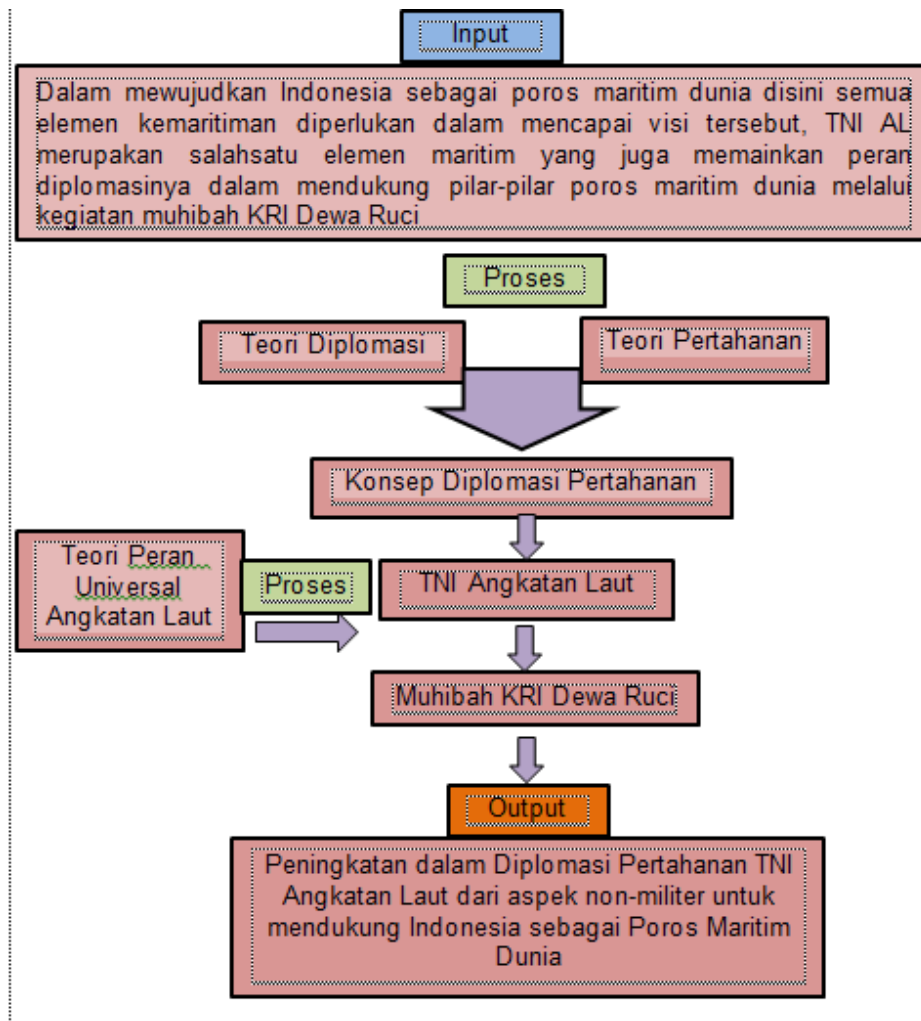
Setiap kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah, merupakan hasil kesepakatan dan keputusan yang diharapkan sudah melalui kajian dan analisis yang mendalam tentang berbagai dampak yang akan timbul pasca implementasi kebijakan. Oleh karenanya, setiap kebijakan publik harus diawali dengan transparansi. Sikap keterbukaan, konsisten, responsif, dan respek kepada setiap anak buahnya dan masyarakatnya merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap aparat pemerintah. Hal lain yang tidak kalah penting dan harus diingat adalah, setiap kebijakan publik yang ditetapkan tidak bisa diberlakukan hanya kepada perseorangan saja akan tetapi bersifat luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Terkait dengan uraian teori-teori di atas, maka KRI Dewa Ruci merupakan salah satu objek dari implementasi kebijakan publik pemerintah melalui Perpres RI No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang terlampir 7 pilar Poros Maritim Dunia di dalamnya. Oleh karenanya, teori tersebut akan digunakan sebagai "*tools analysis*" untuk mengetahui, mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan publik terhadap KRI Dewa Ruci.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan satu kesatuan yang utuh dari penelitian yang akan dilakukan, dan sangat membantu dalam memberikan gambaran tentang penggunaan teori-teori sebagai *tools analysis* terhadap

permasalahan yang akan dibahas. Penggunaan teori Pertahanan, Teori Diplomasi, Konsep Diplomasi Pertahanan, Konsep CBM, Teori Peran Universal Angkatan Laut, Konsep Soft Power, Tinjauan Pustaka Poros Maritim dan Teori Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk menjadi pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini fenomena yang akan diteliti adalah Diplomasi Pertahanan TNI Angkatan Laut melalui misi muhibah KRI Dewa Ruci yang kemudian sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yakni Poros Maritim Dunia. Hal ini juga didasari bahwa TNI Angkatan Laut memiliki peran utama dalam kemaritiman Indonesia. Kemudian TNI Angkatan Laut juga mengemban fungsi diplomasi yang ditujukan untuk meningkatkan citra dan kapabilitas militer Indonesia di dunia. Kegiatan ini diimplementasikan melalui festival dan atraksi budaya dan kesenian daerah Indonesia oleh para kadet Taruna TNI Angkatan Laut. Kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci ini selain digunakan sebagai media *capacity building* yakni sebagai kapal latih para taruna, namun juga turut serta dalam menjaga eksistensi budaya daerah dan kesenian Indonesia melalui atraksi parade di setiap negara yang kunjunginya. Keberadaan KRI Dewa Ruci merupakan eksistensi TNI Angkatan Laut baik itu skala nasional maupun global dan juga sebagai upaya pertahanan Indonesia melihat banyaknya masuk budaya asing ke Indonesia. Sehingga model kerangka pemikiran ialah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran, diolah peneliti, 2018

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini ditinjau dengan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu atau yang telah dilakukan sebelumnya sebagai perbandingan akan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tiga buah penelitian terdahulu yang terdiri dari;

Penelitian pertama merupakan Buku karya Suharsono dengan judul *Isran Noor: Indonesia Negara Maritim Terbesar di Asia* tahun 2013. Buku ini merupakan analisis mendalam mengenai gagasan Isran Noor untuk menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai negara agraris, namun mengubah kerangka berfikir menjadikan Indonesia sebagai negara maritim didukung dengan pandangannya menerapkan kerjasama institusi Angkatan Laut. Teori yang dipakai Konsep maritim dan teori pertahanan. Relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini cukup relevan, hal ini dikarenakan dalam buku tersebut dijelaskan mengenai budaya maritim yang juga merupakan fokus penelitian dalam tulisan ini.

Tulisan kedua yaitu merupakan jurnal yang ditulis oleh Brigjen TNI Sisriadi yang berjudul pengembangan postur pertahanan militer guna mendukung terwujudnya poros maritim dunia ini cukup relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Namun dalam jurnal tersebut peneliti disini berpendapat tulisannya cenderung bersifat normatif dan kurang ilmiahnya dan sarat dengan doktrin militer yang sifatnya operasional. Namun jurnal ini mampu menambah wawasan dan perspektif peneliti terkait adanya kebijakan-kebijakan pertahanan negara.

Kemudian yang terakhir adalah thesis yang ditulis oleh Yusrah Muhammad Haras mengenai Peran TNI AL dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pada tulisan ini peneliti melihat ada relevansi juga dalam penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian teori dan konsep yang dipakai juga sesuai

dengan rumusan masalahnya. Namun, dalam penelitian ini belum adanya aspek diplomasi baik itu secara umum maupun secara khusus diplomasi pertahanan di dalamnya. Sehingga yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini ialah pada aspek diplomasi pertahanannya dan lebih spesifik lagi melalui kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci demi mendukung Indonesia Poros Maritim Dunia.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut akan dibahas oleh peneliti dan menjadi sumber rujukan. Kemudian peneliti juga mengolah ketiga penelitian tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang sumber data-nya terdiri dari sumber primer dan sekunder yang akan diperoleh berbentuk data narasi, deskripsi dan bukan angka. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara peneliti dengan narasumber maupun diskusi panel yang nantinya akan diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berbentuk opini subjek individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil *interview* dengan Komandan KRI Dewa Ruci, Divisi Ops Mabes TNI Angkatan Laut, Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Komandan Sekolah Staff Angkatan Laut, Kementerian Luar Negeri RI yang diwakili oleh Diplomat senior, Praktisi dan Akademisi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak langsung dari sumbernya dimana hal ini diambil dari arsip yang dapat memberikan data tambahan yang dapat membantu peneliti seperti buku, artikel pada majalah ataupun surat kabar, dan situs internet, serta peninjauan langsung lapangan berupa pengambilan foto-foto terutama di KRI Dewa Ruci.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian ini akan dilakukan. Tempat atau lokasi penelitian ini nantinya akan dilaksanakan di Mabes TNI Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah dikarenakan sesuai dengan tema penelitian serta dikonsentrasikan di bagian yang berhubungan dengan aktivitas TNI Angkatan Laut utamanya dalam kegiatan diplomasi muhibah KRI Dewa Ruci dan gagasan visi

Indonesia menjadi negara Poros Maritim Dunia. Sehingga nantinya akan memberikan informasi terkait data primer penelitian.

3.1.2 Waktu Penelitian

Rencana Penelitian yang akan di lakukan ke tempat penelitian yaitu

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Utama	2018						2019	
		Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Bimbingan Proposal								
2.	Sidang Ujian Proposal								
3.	Perbaikan Proposal								
4.	Pengumpulan dan Pengolahan Data								
5.	Penyusunan Tesis								
7.	Ujian Tesis								
8.	Perbaikan Tesis								

Sumber : diolah peneliti, 2018

3.2 Subjek Penelitian dan Narasumber

Subjek penelitian adalah sesuatu baik orang, ataupun benda yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Pada subjek penelitian disini adalah para informan yang dianggap berkompentensi dan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan metode yang diambil. menjadi sumber data primer. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan mengidentifikasi partisipan berdasarkan kriteria tertentu.⁵¹ Sedangkan menurut Arikunto, subjek

⁵¹ Wahyuni, Sari, Qualitative Research Method: Theory and Practice. Jakarta: Salemba Empat, 2012

penelitian diidentifikasi menjadi 3P, yaitu *person*, *place*, dan *paper*.⁵² Sehubungan dengan teknik pemilihan informan dalam institusi-institusi yang nantinya akan dipilih digunakan *purposive sampling*, maka harus ditetapkan kriteria informan yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan yakni informan :

1. Memiliki otoritas, yaitu informan memegang posisi atau jabatan strategis yang berhubungan dengan TNI Angkatan Laut utamanya dalam posisi di KRI Dewa Ruci
2. Memiliki kapasitas, yaitu informan yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang benar dan mendalam terkait Diplomasi Pertahanan KRI Dewa Ruci dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia walaupun tidak menduduki jabatan tertentu di suatu instansi, dan/atau
3. Memiliki hak yang dikuasakan oleh informan semula jika informan yang telah ditentukan berhalangan

Terkait dengan topik penelitian mengenai Diplomasi Pertahanan KRI Dewa Ruci dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka subjek penelitian ini diantaranya : Markas Besar TNI Angkatan Laut, Komando Armada II, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Sekolah Staf Komando Angkatan Laut

Narasumber

Dalam penelitian ini penentuan narasumber dipilih bertujuan untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Sehingga teknik yang digunakan dalam memilih narasumber menggunakan teknik *purposive*, yang mempunyai ciri-ciri khusus yakni:

- 1) *Emergent sampling design*/sementara.

⁵² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 172.

- 2) *Serial selection of sample unit*/menggelinding seperti bola salju (*snowball*).
- 3) *Continuous adjustment of focusing of the sample*/disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4) *Selection to the point of redundancy*/dipilih sampai jenuh.

Peneliti menentukan narasumber dalam penelitian kualitatif saat memasuki lapangan dan berlangsungnya penelitian (*emergent sampling design*). Untuk dapat menetapkan narasumber lain yang memungkinkan akan memberikan data lebih lengkap (*serial selection of sample units*), melalui data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya. Fokus penelitian yang semakin terarah berdasarkan unit sampel yang dipilih semakin terarah (*continuous adjustment of focusing of the sample*). Jika pengumpulan data penelitian sampai pada taraf jenuh maka sampel dianggap telah memadai (*selection to the point of redundancy*). Peneliti memperoleh informasi yang lengkap berdasarkan pada kemampuan informan dalam memasok informasi. Sesuai dengan kriteria sumber data yang dijelaskan diatas maka narasumber penelitian ini terdiri dari :

1. Komando Armada II

Komandan KRI Dewa Ruci : Letkol Laut (P) Waluyo., S.H., M.Tr.Hanla

Kadiv Bahari KRI Dewa Ruci : Letda Laut (P) Husni Hadi Saputra

2. Kementerian dan Koordinator Kemaritiman

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim : Sora Lokita.,S.H.,MIL

3. Mabes TNI Angkatan Laut

a. Sops Kasal diwakili Paban II : Kolonel Laut (P) Suwito

b. Dinas Penerangan Angkatan Laut

Kepala Subdinas Sejarah : Kolonel Laut (KH) Drs. Syarif Thoyib.,
M.Si

Kasi Lissaji Subdisjarah Dispenal : Letkol Laut (KH) Drs. Heri
Sutrisno, M.Si

4. Kementerian Luar Negeri RI

Mantan Duta Besar RI untuk PBB di New York : Prof. Makarim Wibisono., Ph.D

5. Kementerian Pertahanan RI

- a. Direktorat Kerjasama Internasional Kasubdit Multilateral : Kolonel (Kav) Oktaheroe Ramsi., S.IP., M.Sc
- b. Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI diwakili : Kapten Tunggul P., S.IP

6. Sekolah Staf Komando Angkatan Laut

- a. Komandan Seskoal : Laksamana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD
- b. Dosen Seskoal : Kolonel Laut (P) Basri Mustari.,M.Han

7. Dosen Diplomasi Pertahanan : Aris Arif Mundayat., Ph.D

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang peneliti berdasarkan strategi-strategi seperti observasi, wawancara mendalam dan teknik-teknik pelengkap lainnya misalnya foto, rekaman dan lain-lain.⁵³ Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Data yang telah dikumpulkan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penulisan penelitian deskriptif ini berfokus pada *in-depth interview* dan studi pustaka.

Pada penelitian ini, sumber data primernya yaitu informan-informan yang telah dipilih di lingkungan TNI Angkatan Laut dan lingkungan Kementerian terkait seperti yang telah dijelaskan di subyek penelitian diatas. Sedangkan sumber data sekundernya berupa arsip dokumen yang berupa dokumentasi wawancara, catatan-catatan tertulis di lapangan dan

⁵³ Sukmadinata, Nana Syaodoh, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

internet. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Hal ini ditujukan agar wawancara yang dilakukan tepat dan fokus pada permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil *in-depth interview* akan ditulis kembali (*transcribing*) sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Transkrip ini kemudian dianalisis serta diinterpretasikan serta dicari tema serta polanya guna mempermudah peneliti dalam melakukan analisis.

Teknik yang akan digunakan adalah *semi-structured interview* dimana wawancara yang dilakukan berpedoman pada panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya namun pertanyaan akan dielaborasi kembali sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam konteks ini, wawancara mendalam diarahkan untuk menggali data dan informasi kepada beberapa informan seperti dari Komandan KRI Dewa Ruci, Divisi Ops Mabes TNI Angkatan Laut, Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Komandan Sekolah Staff Angkatan Laut, Kementerian Luar Negeri RI yang diwakili oleh Diplomat senior, Praktisi dan Akademisi.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui berbagai sumber yang relevan dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan data-data dan informasi terkait yang berupa buku, tesis, jurnal, website,

materi presentasi, serta dokumen pendukung lainnya yang kemudian diolah berdasarkan rumusan penelitian yang ada. Dokumen pendukung lain yang dimaksud adalah dokumen-dokumen resmi terkait hasil daripada kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci dan juga beberapa buku mengenai kumpulan tentang perjalanan KRI Dewa Ruci serta lampiran Kebijakan Kelautan Indonesia mengenai Poros Maritim Dunia.

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang digunakan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.⁵⁴ Pengujian data tersebut sebagai berikut

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.⁵⁵

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada

⁵⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung, 2007

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 274.

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar⁵⁶.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁵⁷ Sehingga untuk mencapai kepastian data itu, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil suatu wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti menggunakan bermacam-macam data, menggunakan lebih dari satu teori serta melibatkan beberapa narasumber. Melalui metode ini, informasi yang didapat dari wawancara terhadap beberapa narasumber terkait Implementasi Diplomasi Pertahanan TNI Angkatan Laut melalui muhibah KRI Dewa Ruci dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan dibandingkan dengan dokumen atau data lain yang didapatkan dari studi kepustakaan untuk menguji kebenarannya.

3.5 Teknis Analisis Data

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sugiyono., op. cit . hlm. 274.

Analisa data adalah satu bentuk pencarian dan penyusunan data yang dilaksanakan terus menerus sebelum dan selama penelitian. Secara umum, analisa dilakukan dalam dua bagian yaitu: *Pertama*, analisa sebelum di lapangan; dan *kedua* analisa data di saat penelitian (dilapangan). Analisa pertama, dilakukan terhadap hasil data yang dihasilkan dari studi pendahuluan, atau data sekunder.⁵⁸ Selanjutnya, analisa dan interpretasi dari data yang sudah dikumpulkan ini kemudian akan merujuk kepada landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan berdasarkan "*consensus judgement*". Pelaksanaan analisa data dalam penelitian ini belum ada prosedur baku yang dijadikan pedoman para ahli. Hal ini juga dijelaskan bahwa dalam analisa data kuantatif itu metodenya sudah jelas dan pasti. Sedangkan dalam analisa data kualitatif metode seperti itu belum tersedia. Peneliti yang wajib menciptakan sendiri.

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan studi pustaka, selanjutnya peneliti melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisa data, peneliti melakukan teknis analisa deskriptif kualitatif dimana metode ini digunakan dengan memberikan interpretasi secara rasional dan objektif terhadap data yang diperoleh dan proses selanjutnya adalah menggambarkan hubungan antara variabel satu dengan lainnya sehingga dapat mendeskripsikan fenomena secara lebih konkrit dan rinci. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menghubungkan antara diplomasi pertahanan yang dilakukan TNI Angkatan Laut Indonesia melalui misi muhibah KRI Dewa Ruci kemudian meninjau terhadap penciptaan visi Indonesia menjadi negara Poros Maritim Dunia dilihat dari pilar-pilar Poros Maritim Dunia. Dalam penelitian

⁵⁸ *Ibid*

ini, penulis mengacu pada Miles dan Huberman terkait proses analisa data;⁵⁹

Tabel 3.2 Proses Analisis Data

PROSES	KEGIATAN
<p>Kondensasi Data (Data Condensation)</p>	<p>Merumuskan rangkuman, <i>transcribing</i> data yang didapat dari hasil wawancara, serta melakukan pemilihan data khususnya diplomasi pertahanan Indonesia melalui TNI Angkatan Laut dalam misi muhibah KRI Dewa Ruci yang didapatkan dari pihak terkait kemudian data mengenai Indonesia poros Maritim Dunia yang dilihat dari pilar-pilar di Kebijakan Kelautan Indonesia. Mereduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang terkumpul memberikan gambaran yang lebih jelas dan selanjutnya dapat mempermudah peneliti dalam mencari data yang diperlukan.</p>
<p>Penyajian Data (Data Display)</p>	<p>Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam Penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang</p>

⁵⁹ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J, 2014, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, USA: Sage Publications, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

	bersifat naratif.
Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (<i>Conclusion Drawing or Verification</i>)	Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap.

Sumber : diolah peneliti, 2018

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 KRI Dewa Ruci

Ide dasar yang memprakarsai perlunya sebuah kapal layar latih di jajaran Angkatan Laut Republik Indonesia pada saat itu ialah A.F.H. Roosenow yang kemudian disetujui oleh Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) pada saat itu Kolonel R. Soebijakto.⁶⁰ Dengan berbagai pertimbangan hingga kemudian dilakukan pengadaan kapal layar latih tiang tinggi (*tall ships*) buatan Jerman dengan tipe Barquentine yang dibawa langsung dari Jerman di tahun 1953 dan diberi nama KRI Dewa Ruci.⁶¹ Pengadaan KRI Dewa Ruci merupakan simbol hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Jerman. Kapal ini awalnya dibuat pada tahun 1932, namun sempat terhenti karena pada saat itu pecah Perang Dunia ke- II sehingga galangan kapal pembuatnya rusak parah. Hingga akhirnya kapal Dewa Ruci ini selesai dibuat di tahun 1952, setahun setelahnya kapal ini yang dibangun di H.C. Stulchen dan Sohn Hamburg diresmikan pada 24 Januari 1953.⁶²

Keberadaan *tall ships* dipergunakan sebagai kapal latih untuk mempersiapkan para pelaut profesional baik dari kalangan sipil maupun angkatan laut. Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa kapal layar tiang tinggi sebagai penempa profesi bahari. Adapun penggunaan *tall ships* sebagai kapal latih ini memiliki pertimbangan. Pertama, kapal dengan sumber penggerak layar dan peralatan navigasi tradisional memiliki tingkat kesulitan tinggi yang merupakan tantangan bagi setiap calon pelaut. Pertimbangan kedua, pengoperasian kapal layar memadukan

⁶⁰ Dinas Penerangan Angkatan Laut Indonesia, KRI Dewa Ruci Sang Legenda, Jakarta: Mabes Angkatan Laut Indonesia, 2012, hal. 14

⁶¹ *Ibid.*, Hal.16

⁶² *Ibid.*, Hal.17

ketrampilan individu dan kerjasama kelompok. Ketiga, pengoperasian kapal layar tiang tinggi merefleksikan sejarah dan kejayaan maritim bagi negara-negara yang menggunakannya.

Sampai tahun 1950 tercatat sekitar 25 kapal dari 15 negara terutama negara besar menggunakan *tall ships* yang dipergunakan sebagai kapal latih untuk mempersiapkan para pelaut profesional baik dari kalangan sipil maupun angkatan laut.⁶³ Sebut saja *tall ships* yang populer saat itu ialah Eagle asal Amerika Serikat, Juan Sebastian Elcano asal Spanyol, Gorch Fock asal Jerman dan Amerigo Vespucci asal Italia.⁶⁴ Salah satu daya tarik KRI Dewa Ruci dan yang membedakannya dengan *tallships* pada umumnya ialah sarat dengan muatan seni rupa tradisional yang terlihat dari beberapa sudut kapal. Kemudian keunikan lagi ialah KRI Dewa Ruci ini tidak memiliki nomor lambung sebagaimana halnya kapal perang lainnya.

Para pengunjung yang masuk di KRI Dewa Ruci akan merasakan nuansa nusantara dari tampilan ukir-ukiran di sejumlah tempat dari geladak utama hingga ruang-ruang bagian dalamnya. Dimulai dari cocor bagian bawah terdapat patung dewa ruci setengah badan. Dalam dunia *tallships* patung ini disebut sebagai *figurehead* yang biasanya merupakan visualisasi figur dari nama kapal. *Figurehead* KRI Dewa Ruci sejak awal sudah menghiasi kapal ini beberapa diantaranya telah hilang akibat dihempaskan ganasnya ombak di laut, sehingga terdapat beberapa patung yang berbeda karena seiring pergantian patung *figurehead* tersebut.

Kemudian tiga tiang yang ada di KRI Dewa Ruci juga sarat dengan budaya dimana terdiri dari tiga motif ukuran dari tiga daerah di Indonesia. Tiang Bima yang terletak paling depan dihiasi dengan ukiran toraja kemudian tiang Arjuna yang berada di tengah dengan ukiran Jepara.

⁶³ *Ibid.*, Hal.18

⁶⁴ *Ibid.*, Hal. 21

Sedangkan tiang Yudhistira yang berada paling dekat dengan anjungan kapal dibalut dengan ukiran bermotif Dayak. Kemudian ukiran-ukiran tradisional masih bisa dilihat di ruang-ruang bagian dalam kapal. Di ruang yang merupakan ruang tamu VIP, di tempat tersebut terdapat dua buah meja tamu kaca yang kaki-kakinya dipahat dengan motif ukiran Bali. Sementara di ruang lounge room perwira terdapat panel ukiran bermotif Jepara yang mengisahkan pertempuran Bima dengan naga sebelum bertemu dengan Dewa Ruci. Untuk spesifikasi KRI Dewa Ruci bisa dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4.1
Spesifikasi KRI Dewa Ruci

Pelabuhan Utama	Komando Armada II TNI AL
Berat Benaman	847 Ton
Panjang	583 meter
Lebar	950 meter
Draft	405 meter
Tenaga Penggerak	1 Unit Diesel 986 HP, dengan satu propeler berdaun 4.
Kecepatan	10,5 knot dengan mesin; 9 knot dengan layar.
Awak Kapal	75 Orang
Tiang Utama	3 tiang utama (Bima, Yudhistira, dan Arjuna)
Jumlah Layar	Tipe Barquentin, 16 layar.

Sumber : Dinas Penerangan Angkatan Laut diolah oleh peneliti, 2018

Adapun misi KRI Dewa Ruci dalam pelayarannya mengemban misi :

1. Kapal latih taruna Akademi TNI Angkatan Laut (AAL)
2. Mengenalkan budaya, kesenian, wisata Nusantara dan informasi lainnya tentang Indonesia
3. Sebagai pengemban Diplomasi Internasional

Sedangkan Motto KRI Dewa Ruci sendiri ialah :

Cita-Cita : Mempunyai sesuatu tujuan atau keinginan yang akan dicapai pada suatu nanti melalui usaha yang benar

Akal Budi: Mempunyai pemikiran yang sehat untuk menggapai cita-cita dan bertingkah laku baik

Berani: Sikap pantang menyerah dalam memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting dan mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat menghalanginya karena percaya kebenarannya

Jujur: Sikap atau sifat yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambah atau dikurangi

Guna Bakti: Memiliki manfaat, berguna dan berbakti kepada nusa dan bangsa Indonesia.

Dalam melakukan ekspedisi muhibah KRI Dewa Ruci disebut dengan operasi Kartika Jala Krida (KJK). Operasi ini ditujukan untuk melahirkan seorang perwira matra laut profesional yang berkarakter, bermoral, memiliki etos prajurit pejuang, dan berwawasan. Sehingga prosesnya itu harus ditempa dan melalui proses yang panjang dan latihan yang terus menerus. Operasi ini merupakan salahsatu program penting yang wajib dilewati oleh para Taruna AAL utamanya korps pelaut, teknik, elektronika dan suplai.

Latihan pelayaran ini dilaksanakan secara terprogram dalam kalender pendidikan AAL, dengan tujuan untuk praktik navigasi dasar, astronomi, dan pelajaran profesi dasar matra laut pada kondisi yang sebenarnya. Pelayaran dilaksanakan selama 2-3 bulan disertai dengan kegiatan muhibah ke kota-kota tujuan baik itu di dalam maupun luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan pergaulan kadet AAL pada kultur kehidupan berbagai bangsa dan suku bangsa mulai dari lingkup nasional hingga internasional. Selain latihan pelayaran KJK di AAL para kadet harus menjalani latihan pelayaran Pra Jalasesya, Jalasesya dan Kartika Jala Yudha (KJY).

Muhibah KRI Dewa Ruci ini juga sekaligus menjadi kesempatan diplomasi Indonesia kepada negara lain di dunia yang di mulai tahun 1957. Kapal latih ini juga memiliki misi utama sebagai perangkat diplomasi Indonesia yang dimulai pada era Presiden Soekarno. Pada era tersebut mungkin sebagian warga dunia lebih mengenal Presiden Soekarno daripada Indonesia. Sehingga dengan adanya misi muhibah KRI Dewa Ruci keliling dunia ini juga sekaligus mengenalkan kepada dunia tentang Indonesia dan keanekaragaman budaya seni yang dimilikinya. Kemudian partisipasinya Indonesia di ajang ekspedisi muhibah tersebut juga sarat dengan upaya perjuangan misi diplomasi demi menunjukkan nilai-nilai dan martabat bangsa kepada dunia internasional.

4.2 Analisis Data (Temuan Hasil Penelitian)

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini, sesuai dari subfokus penelitian yaitu : KRI Dewa Ruci dalam melaksanakan Diplomasi Pertahanan TNI Angkatan Laut, KRI Dewa Ruci dalam mengemban misi-misi TNI Angkatan Laut sebagai implementasi pilar-pilar Poros Maritim Dunia, serta Implementasi Diplomasi Pertahanan KRI Dewa Ruci dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Selanjutnya data yang diperoleh dari tiap-tiap aspek dalam penelitian, dianalisis apakah implementasi Diplomasi Pertahanan TNI Angkatan Laut ini melalui KRI Dewa Ruci sudah dapat mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia kedepannya. Terkait dengan topik penelitian tersebut, disini peneliti melakukan penelitian terhadap narasumber yang terdiri dari Komandan Dewa Ruci, Kementerian dan Koordinator Maritim bagian Deputi Kedaulatan Maritim, Mabes TNI Angkatan Laut bagian Sops Kasal dan Dispenal, Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan Direktorat Kerjasama Internasional dan Baranahan, Komandan dan Dosen Sekolah Staf Komando Angkatan Laut, praktisi, serta akademisi.

4.2.1 KRI Dewa Ruci dalam melaksanakan Diplomasi

Tugas pokok TNI Angkatan Laut yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 Pasal 9 salah satunya ialah melaksanakan tugas diplomasi. Sehingga disini Angkatan Laut memegang peranan utama dalam mendukung diplomasi Indonesia. Dalam konteks penggunaan kekuatan Angkatan Laut baik itu dalam masa damai dan perang, diplomasi adalah praktek yang lumrah. Oleh karena itu, dalam Angkatan Laut dikenal istilah populer seperti *gunboat diplomacy* (diplomasi kapal perang) dan selanjutnya muncul pula istilah *naval diplomacy* (diplomasi Angkatan Laut) dan *maritime diplomacy* (diplomasi maritim).⁶⁵

Untuk memahami perbedaan ketiganya ini dalam wawancara dengan Komandan Seskoal dijelaskan bahwa secara umum *gunboat diplomacy* ialah penggunaan kekuatan Angkatan Laut melalui kapal perang yang ditujukan untuk perang misalnya pameran kekuatan dan demonstrasi kekuatan. Kemudian *naval diplomacy* itu ialah kerjasama antar Angkatan Laut negara satu dengan negara lainnya untuk menurunkan tingkat mispersepsi dan konflik pada negara-negara tersebut. Sedangkan kalau *maritime diplomacy* ialah kerjasama tidak hanya dalam keamanan saja namun juga dalam hal kesejahteraan.

Salah satu diplomasi yang dijalankan oleh TNI Angkatan Laut disini ialah melalui kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci. Dalam wawancara dengan Komandan KRI Dewa Ruci dijelaskan pula bahwa Diplomasi yang dibawa oleh KRI Dewa Ruci itu adalah bagian dari diplomasinya Angkatan Laut yakni *naval diplomacy* jadi yang dikedepankan ialah kerjasama keamanan antar Angkatan Laut dengan pendekatannya melalui kapal perang layar tiang tinggi yang tradisional model Barquentine.⁶⁶ Diplomasi

⁶⁵ Wawancara dengan Komandan Seskoal di Seskoal Cilangkap Jakarta, pada 7 September 2018.

⁶⁶ Wawancara dengan Komandan KRI Dewa Ruci di Tanjung Priok di Jakarta, pada 10 Agustus 2018.

tersebut terwujud dalam kegiatan muhibah atau mengunjungi negara-negara sahabat di seluruh penjuru dunia, ataupun mengikuti *event-event* perlombaan kapal tiang tinggi tingkat Internasional (*tall ships race international festival*). Hal ini ditujukan sebagai media untuk meningkatkan kerjasama antar negara dan menjalin hubungan persahabatan dengan negara lain.

Lebih lanjut hal ini juga sama dengan pendapat dari Kasubdit Multilateral Direktorat Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan RI yang menyebutkan bahwa:

adanya kegiatan festival kapal layar internasional tersebut dapat menjadikan opini publik untuk Indonesia dikenal di mata dunia. Kegiatan muhibah keliling dunia oleh KRI Dewa Ruci ini tidak hanya memperkenalkan Angkatan Laut Indonesia saja, namun juga adanya promosi budaya Indonesia dan sekaligus yang paling penting adalah menyebarkan nilai-nilai budaya di Indonesia yang nantinya dapat diterima di negara yang kita kunjungi, salah satunya nilai budaya yang dibawa dalam muhibah KRI Dewa Ruci ini ialah menyampaikan pesan-pesan damai kepada dunia.⁶⁷

Selain itu, ketika berlabuh di setiap negara seluruh awak kapal KRI Dewa Ruci akan menampilkan kesenian tradisional Indonesia dan menyuguhkan beberapa kuliner khas Indonesia dimana hal tersebut juga bertujuan untuk menarik minat wisata warga penduduk setempat untuk berkunjung ke Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan negara di mata dunia yakni fungsi diplomasi, TNI Angkatan Laut sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait erat dengan usaha pengembangan *Confidence Building Measures (CBM)* yakni rasa saling percaya antara negara. Adapun kegiatan-kegiatan yang terkait erat dengan CBM antara lain:⁶⁸

- a. Melaksanakan Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan wilayah perairan lain untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Bentuk operasi pengamanan dilaksanakan secara mandiri

⁶⁷ Wawancara dengan Kasubdit Multilateral Kemhan RI di Jakarta, pada 8 September 2018.

⁶⁸ *Ibid.*

- oleh TNI Angkatan Laut dan secara gabungan antara TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Operasi juga dilaksanakan dengan negara lain secara bilateral atau trilateral, misalnya operasi *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP) yang dilaksanakan di Selat Malaka sebagai salah satu *chokepoint* terpadat di dunia, antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta juga mengikut sertakan Thailand;
- b. Meningkatkan kemampuan operasi di luar yurisdiksi nasional untuk melindungi kepentingan nasional. Contoh konkrit pelaksanaan operasi ini adalah pengiriman Satgas Merah Putih yang terdiri dari dua KRI kelas Ahmad Yani (*Van Speijk*) yang membawa pasukan gabungan TNI untuk pembebasan sandera MV. Sinar Kudus di Perairan Somalia pada Bulan Mei 2011
 - c. Mengirimkan TNI Angkatan Laut dalam misi perdamaian. Misi perdamaian PBB ini juga dilaksanakan melalui pengiriman KRI untuk misi *Maritime Task Force* (MTF) ke Lebanon untuk menjaga keamanan perairan Mediterania. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa misi bersangkutan sudah terealisasi dengan pengiriman pasukan ke Lebanon sejak tahun 2009. Hingga saat ini, tercatat sudah 9 kali pasukan perdamaian dari TNI Angkatan Laut yang dikirim ke Lebanon.
 - d. Melaksanakan berbagai latihan militer bersama misalnya, latihan militer multilateral yang dikenal dengan "*Multilateral Naval Exercise Komodo*" (MNEK). MNEK merupakan latihan bersama TNI Angkatan Laut dengan tentara-tentara dari berbagai negara. Kegiatan latihan bersama ini sudah dilaksanakan beberapa kali yakni; pada 2014 di Batam dan pada 2016 di Padang dan Mentawai yang dihadiri oleh 35 negara sahabat. Kemudian tahun 2018 bulan Mei akan dilaksanakan di Lombok yang dihadiri 45 negara sahabat.
 - e. Pengiriman perwakilan TNI Angkatan Laut dalam berbagai festival atau acara internasional yang dilaksanakan oleh angkatan laut negara lain. Salah satunya adalah pengiriman KRI Dewa Ruci, Bima Suci, dan Arung Samudera untuk mengikuti festival layar internasional.

f. Melaksanakan beberapa *sail* dengan mengundang angkatan laut dari berbagai negara, misalnya *Sail Bunaken* (2009), *Sail Banda* (2010), *Sail Wakatobi* (2011), *Sail Morotai* (2012), *Sail Derawan* (2013), *Sail Komodo* (2013) dan *Sail Raja Ampat* (2014). *Sail* dilaksanakan selain sebagai bentuk *naval diplomacy* juga dimaksudkan untuk mempromosikan potensi pariwisata maritim kepada dunia internasional.

Dari kegiatan di atas, bisa kita lihat bagaimana TNI Angkatan Laut mencoba untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dalam konteks diplomasi pertahanan. Pengiriman KRI Dewa Ruci tidak hanya dilaksanakan sebagai perwujudan kepentingan nasional yang ingin menciptakan perdamaian dunia, tetapi juga sebagai bentuk realisasi daripada tujuan diplomasi pertahanan antara lain: sebagai representasi negara, peningkatan kredibilitas, pembentukan opini publik, serta membangun rasa saling percaya yang berasaskan pada usaha bersama dalam menciptakan kondisi dunia yang stabil.⁶⁹

Sementara itu, latihan militer bersama serta keikutsertaan TNI Angkatan Laut dalam berbagai festival internasional dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan serta kredibilitas, peningkatan kontak, pembangunan rasa saling percaya, serta kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai perwakilan Indonesia di mata dunia. Saat wawancara dengan Komandan KRI Dewa Ruci juga sempat disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan diplomasi pertahanan terdapat berbagai keuntungan yang diperoleh baik oleh pihak Indonesia secara umum, maupun oleh pihak TNI Angkatan Laut. Misalnya saja dalam pertemuan-pertemuan persahabatan yang digelar, TNI Angkatan Laut juga berkesempatan tidak hanya mengenalkan budaya Indonesia serta mempererat relasi antara Indonesia dengan negara-negara bersangkutan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membahas kepentingan Angkatan

⁶⁹ Wawancara dengan Dosen Seskoal di Unhan, pada 10 September 2018.

Laut seperti kerjasama tentang operasi, latihan ataupun tentang pendidikan.

Keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam festival atau acara internasional lainnya tidak hanya mencerminkan upaya pelaksanaan diplomasi pertahanan tetapi juga kebudayaan. Pengiriman KRI Dewa Ruci merupakan wujud diplomasi pertahanan melalui budaya. Melalui muhibah KRI Dewa Ruci ini TNI Angkatan Laut membawa serta budaya dan kesenian bahkan kuliner Indonesia di mata internasional. Diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh kapal latih taruna TNI Angkatan Laut ini terealisasi dalam berbagai aktivitas budaya yang dipertunjukkan oleh para taruna di hadapan masyarakat internasional saat kapal tersebut singgah di pelabuhan negara lain. KRI Dewa Ruci tidak hanya menjadi perwakilan pertahanan Indonesia di mata dunia tetapi juga telah menjadi “wajah” atau duta keliling kebudayaan Indonesia.

Mengutip buku yang ditulis oleh mantan KSAL DR. Marsetio dalam bukunya TNI Angkatan Laut berkelas Dunia: Paradigma Baru, bahwa peran penting TNI Angkatan Laut telah mendapat apresiasi dari beberapa pemimpin Angkatan Laut negara-negara lain. Saat menghadiri acara *cocktail party* di atas geladak USS, Blue Ridge (LCC-19) di Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2012 Asisten Pengamanan Kasal Laksamana Muda TNI Ir. I Putu Yuli Adnyana, M.H sempat berdiskusi dengan Panglima Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Madya Scott H. Swift dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa:

“... mengapa US Navy perlu menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan TNI Angkatan Laut pertama, karena pentingnya peran TNI Angkatan Laut di kawasan; kedua, karena kemampuan yang diperlihatkan oleh TNI Angkatan Laut saat ini dengan berpartisipasi pada tiga kegiatan internasional yaitu: (1) KRI Dewa Ruci saat ini berada di New York untuk menghadiri Operation Sail Boston 2012 (2) ada unsur TNI Angkatan Laut yang berada di Lebanon bertugas dalam misi PBB dan (3) ada unsur TNI AL yang mengikuti latihan Kakadu 2012. Tidak semua Angkatan Laut di

dunia mampu melaksanakan tiga kegiatan berskala internasional pada saat yang bersamaan sehingga TNI Angkatan Laut sudah world class Navy...⁷⁰

Adanya fungsi diplomasi yang dibawa oleh KRI Dewa Ruci dalam setiap kegiatan muhibahnya merupakan suatu wujud wajah Indonesia di mata dunia. Hal ini dikarenakan dalam setiap muhibahnya, KRI Dewa Ruci selalu mempromosikan nilai-nilai budaya Indonesia dan juga selalu membawa pesan damai. Sehingga hal inilah yang menjadikan opini publik bagi Indonesia di mata dunia bahwa negara Indonesia adalah negara yang selalu membawa pesan perdamaian sekaligus selaras dengan arah politik luar negeri kita yang bebas aktif.

Dalam setiap muhibahnya, KRI Dewa Ruci juga sebagai upaya penciptaan Diplomasi Pertahanan yang di dalamnya juga ada unsur CBM, tidak lain ialah untuk mengurangi mispersepsi dan menjalin hubungan bilateral yang baik bagi negara yang dikunjunginya. Kunjungan KRI Dewa Ruci ke dunia internasional itu juga sekaligus mempromosikan kemampuan alutsista dan personel TNI Angkatan Laut kepada dunia internasional. Kualitas sumber daya manusia dibangun hingga setara dengan negara besar dan mengungguli kualitas personel Angkatan Laut negara-negara di kawasan. Dengan kondisi seperti ini, maka akan memberikan dampak penangkalan terhadap negara-negara di kawasan dan sekaligus untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara kawasan atas keberadaan kekuatan TNI Angkatan Laut.

⁷⁰ Marsetio, TNI Angkatan Laut berkelas Dunia: Paradigma Baru, Jakarta: Markas Besar Angkatan Laut, 2014

4.2.2 KRI Dewa Ruci sebagai implementasi pilar-pilar Poros Maritim Dunia

Pada pertanyaan penelitian kedua yaitu KRI Dewa Ruci dalam implementasi pilar-pilar Poros Maritim Dunia, disini peneliti akan memfokuskan utamanya pilar ke-1, pilar ke-6 dan pilar ke-7 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Hal ini untuk melihat apakah KRI Dewa Ruci dalam setiap muhibahnya sudah termasuk ke dalam pilar-pilar yang ada di Kebijakan Kelautan Indonesia tersebut. Kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci ini juga sekaligus nantinya akan mendukung perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi kelautan Indonesia adalah menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pertahanan dan keamanan serta perdamaian kawasan regional dan internasional yang sesuai dengan kepentingan nasional.

Dalam Kebijakan Kelautan Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 juga disebutkan bahwa perkembangan lingkungan strategis Indonesia ini mengalami perubahan yang pesat, kondisi geopolitik dan geostrategis di Asia Timur dan Asia Tenggara yang diwarnai oleh sejumlah ketegangan berpotensi berkembang menjadi sumber konflik baru yang nantinya akan mengganggu ketahanan regional. Sehingga Indonesia harus mampu menunjukkan kepemimpinannya (*leadership*) dalam bidang kelautan regional dan global dengan cara meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara-negara strategis sehingga mampu menciptakan suatu arsitektur keamanan di Asia. Dimensi maritim yang kuat harus mampu mewakili implementasi politik luar negeri bebas aktif yang tercermin dalam sumber daya diplomasi yang memadai.

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, dan didukung dengan pengumpulan data melalui studi literatur maka diperoleh hasil data mengenai implementasi muhibah KRI Dewa Ruci dalam mendukung

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dilihat dalam 3 pilar yaitu pilar ke-1, pilar ke-6 dan pilar ke-7:

Pilar ke-1 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam pilar pertama ini Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibagi lagi kedalam 2 sub:

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan : Dalam sub ini kebijakan sumber daya kelautan bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan dengan prinsip ekonomi biru. Pertumbuhan ekonomi di bidang kelautan ini juga utamanya dilakukan dengan strategi melalui pembangunan yang efisien, bernilai tambah, inklusif dan inovatif sebagai penunjang seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi barang, jasa dan investasi yang bertujuan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia : Dalam sub ini kebijakan pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu.

Dalam pilar pertama ini posisi KRI Dewa Ruci menempati sub yang kedua yakni dalam wujud pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kelautan hal ini juga sejalan dengan para personel KRI Dewa Ruci yaitu para kadet TNI Angkatan Laut tingkat III. Hasil wawancara dengan staf Kementerian Koordinator Kemaritiman juga menjelaskan bahwa strategi dalam pengembangan sumber daya manusia ini diharapkan ada beberapa aspek seperti yang ada di Kebijakan Kelautan Indonesia diantaranya:

a. Peningkatan jasa di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan

- b. Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan
- c. Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan
- d. Peningkatan gizi masyarakat kelautan
- e. Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan
- f. Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenjang pendidikan
- g. Penyusunan kurikulum pendidikan yang berorientasi kelautan
- h. Peningkatan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi bidang kelautan
- i. Penyediaan insentif dan bantuan pendidikan bidang kelautan dan riset strategis kelautan
- j. Pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah pelayaran dan perikanan
- k. Peningkatan kolaborasi riset kelautan dan pengembangan pusat keunggulan kelautan dan
- l. Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis

Dalam hal *capacity building*, disini pilar pertama dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia utamanya dalam hal pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan, KRI Dewa Ruci juga turut melaksanakannya melalui para kadet tingkat III Taruna Angkatan Laut dan para awak kapal. Mantan Duta Besar PBB RI di New York Prof. Makarim Wibisono juga pernah ikut dalam pelayaran KRI Dewa Ruci saat KRI Dewa Ruci singgah di New York dan beliau berpendapat bahwa:

Muhibah yang dilakukan oleh KRI Dewa Ruci ini juga sekaligus momentum kesempatan para taruna untuk keluar negeri dan sekaligus untuk meningkatkan kapasitas dalam berlayar si taruna tersebut, sehingga sejak masih taruna ini mereka mempunyai kemampuan untuk memperbandingkan Angkatan Laut negara satu dengan negara lain,

kemudian tidak hanya itu secara umum para taruna juga belajar mengenai kondisi negara maju dan berkembang di setiap berlabuh di suatu negara sahabatnya, sehingga kedepannya bisa menjadi pembelajaran bagi dirinya dan Indonesia kedepannya.⁷¹

Sebagai wujud pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang kelautan, KRI Dewa Ruci mampu untuk meningkatkan *capacity building* para taruna Angkatan Laut yang profesional.

Pilar ke-6 Budaya Bahari

Kebijakan budaya bahari bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap wawasan bahari di seluruh lapisan masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan dan lestari. Budaya bahari memiliki peran penting dalam membangun bangsa yang berorientasi kelautan. Dengan budaya bahari, masyarakat Indonesia akan belajar keuletan, kerja keras, *entrepreneurship*, gotong royong, menghargai perbedaan, dan cinta akan lingkungan. Budaya bahari yang kuat akan menjadikan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang, tempat belajar, berkarya, berolahraga, dan berkreasi, serta mendidik masyarakat.

Adapun strategi dalam melaksanakan implementasi dari kebijakan pilar budaya bahari ini ialah:

- a. Meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah NKRI sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional
- c. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari
- d. Melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari dan

⁷¹ Wawancara dengan Prof. Makarim Wibisono., Ph.D Perwakilan Kementerian Luar Negeri (Mantan Duta Besar RI di New York) di Jakarta, pada tanggal 26 September 2018

- e. Mempertahankan, mengembangkan, dan meningkatkan peran kota-kota pelabuhan bersejarah

Dalam mendukung visi Poros Maritim Dunia ini Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemkomaritim) telah membuat Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster program prioritas, yaitu: ⁷²

1. Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim;
2. Industri Maritim dan Konektivitas Laut;
3. Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut;
4. Pertahanan dan Keamanan Laut; dan
5. Budaya Bahari.

Secara skematik lima klaster program prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.1 Lima Program Prioritas Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

Sumber : Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, diolah peneliti, 2018

⁷² Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Dalam implementasinya, KRI Dewa Ruci saat ini belum ada kebijakan khusus dari Kemenkomaritim untuk mendukung pilar mengenai Poros Maritim Dunia. Hasil wawancara dengan Deputi Kedaulatan Maritim juga menyebutkan harapan kedepannya KRI Dewa Ruci dan Bima Suci akan dapat melaksanakan pilar-pilar dalam Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam pilar ke 6 mengenai budaya bahari, disini peran KRI Dewa Ruci juga turut mensukseskan dalam sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat mengenai nilai-nilai budaya bahari Indonesia melalui Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) tahun 2017 yang waktu itu diikuti oleh 68 pelajar dari 34 Provinsi se-Indonesia yang melakukan muhibah hampir satu bulan di berbagai tempat di Pulau Sumatera.⁷³

Program ENJ ini merupakan pelopor untuk mendukung gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang diinisiasi dan didanai secara penuh oleh Kemenkomaritim. Bahkan saat penutupan acara ENJ tersebut para peserta yang mengikuti program tersebut dinilai antusias dan semangatnya masih tinggi sama seperti di awal sebelum melakukan muhibah, hal ini yang kemudian dikatakan ENJ KRI Dewa Ruci sudah cukup berhasil dengan baik sebagai program dalam kegiatan yang menumbuhkan dan menguatkan kembali jiwa kemaritiman bagi generasi muda.

Strategi yang sebelumnya telah dijabarkan melalui Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) pada point diatas juga turut membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Adanya KRI Dewa Ruci sebagai fasilitator dalam kegiatan ENJ ini juga membawa generasi muda Indonesia untuk lebih mencintai kemariitman dan kelautan, serta nantinya akan menarik minat mereka dalam berkontribusi dalam bidang

⁷³ Wawancara dengan Kepala bagian Pelaporan Deputi Kedaulatan Maritim di Bogor, pada 13 Agustus 2018.

kemaritiman kedepannya. Negara Indonesia ini negara kepulauan terbesar dan kita harus punya *ambassador* kepada dunia internasional bahwa kita negara maritim, KRI Dewa Ruci ini mempresentasikan budaya bahari kita melalui muhibahnya, maka disini KRI Dewa Ruci sebagai *ambassador* Indonesia untuk budaya bahari dan maritim.⁷⁴

Pilar ke-7 Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Diplomasi maritim Indonesia tidak dapat hanya diartikan secara sempit dalam bentuk perundingan internasional di bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi angkatan laut. Diplomasi maritim Indonesia adalah pelaksanaan politik luar negeri yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global tetapi juga menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Adapun strategi dalam Kebijakan Kelautan Indonesia yang akan mendukung dalam kebijakan pilar diplomasi maritim ini ialah:

- a. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral
- b. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan
- c. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan
- d. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga

⁷⁴ *Ibid*

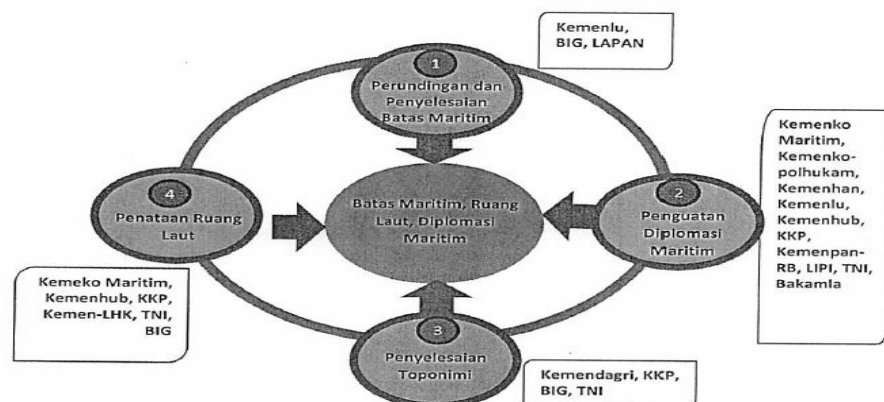
- e. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional
- f. Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi Internasional di bidang kelautan dan
- g. Pembakuan nama pulau

Dalam menjalankan upaya diplomasi maritim, Kemenkomaritim mempunyai Program Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 mengenai prioritas batas maritim, ruang laut, dan diplomasi maritim.

Terdiri atas 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu:

1. Perundingan dan Penyelesaian Batas Maritim;
2. Penguatan Diplomasi Maritim;
3. Penyelesaian Toponimi; dan
4. Penataan Ruang Laut.

Secara skematik Adapun empat kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2 Empat Kegiatan Prioritas Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

Sumber : Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, diolah peneliti, 2018

Dalam lampiran rencana aksi tersebut, penguatan diplomasi maritim kementerian/lembaga yang terkait ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, TNI, dan Badan Keamanan Laut. Dalam hal ini TNI juga memberikan kontribusi bagi penguatan diplomasi maritim Indonesia. Menurut hasil kegiatan prioritas tersebut capaian yang telah kementerian dan lembaga terkait khususnya TNI dalam diplomasi maritim diantaranya :

- a. Peningkatan peran aktif dalam upaya penciptaan perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan dengan terselenggaranya keamanan maritim kawasan yaitu pengamanan Laut Sulawesi yang berada di Tri Border Area antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Kemudian kerjasama latihan bersama antara TNI dengan Angkatan Laut negara kawasan secara bilateral dan regional
- b. Penyelenggaraan Operasi militer selain perang TNI dengan terselenggaranya Sail Bahari yakni Sail Selat Karimata tahun 2016, Sail Sabang 2017, Sail to Indonesia 2018. Hal ini yang kemudian akan memperkuat diplomasi maritim Indonesia kepada dunia dengan tingginya antusias negara-negara di dunia yang hadir untuk memeriahkan Sail Festival tersebut.
- c. Meningkatnya penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah kedaulatan berupa patroli laut di kawasan Indonesia barat dan timur dengan mewujudkan laut menjadi terkendali di ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), demikian pula semua *chokepoint* di sekitar perairan Sabang, perairan Natuna, perairan Sangihe Talaud, perairan Halmahera, dan perairan Laut Arafura

- d. Partisipasi dan peran aktif Indonesia dalam *Asean Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security* dan kerjasama keamanan laut
- e. Terbentuknya *Regional Convention Against Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing and its Related Crimes*

Rangkaian hasil tersebut merupakan capaian dalam hal penguatan diplomasi maritim yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait khususnya TNI dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Bisa dilihat rangkaian kegiatannya, TNI Angkatan Laut cukup memegang peranan yang besar. Penguatan dalam diplomasi maritim juga sejalan dalam rangka CBM yang dapat dilakukan dengan patroli terkoordinasi, muhibah, tugas perdamaian dan latihan bersama. Diplomasi maritim oleh TNI Angkatan Laut juga bisa berupa pengerahan KRI ke suatu negara yakni mendukung delegasi Indonesia untuk mengadakan perundingan baik berupa negosiasi atau bentuk kerjasama antar negara yang saling menguntungkan.

Kehadiran KRI Dewa Ruci ini misalnya juga turut mendukung delegasi Indonesia di luar negeri dan sangat membantu proses berhasilnya tujuan yang hendak dicapai dalam diplomasi maritim.⁷⁵ KRI Dewa Ruci juga berperan dalam perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia utamanya dalam konteks diplomasi maritim, budaya maritim (bahari), serta peningkatan sumber daya manusia. Hadirnya KRI Dewa Ruci juga sebagai *ambassador* Indonesia saat melakukan misi muhibahnya ke luar negeri. Sehingga tidak heran apabila KRI Dewa Ruci mampu memiliki jutaan penggemarnya dalam lingkup internasional. Setiap muhibahnya selalu ditunggu-tunggu dan prestasi yang diukir oleh KRI Dewa Ruci juga semakin menunjukkan eksistensinya di dunia Internasional

⁷⁵ Wawancara dengan Asops Mabes AL secara korespondensi melalui email pada 4 September 2018.

yang kemudian juga ikut mensukseskan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Saat ini melalui Kemenkomaritim, visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia khususnya dalam bidang Diplomasi Maritim dan Budaya Bahari Kemenkomaritim telah melakukan upaya yaitu :

1. membuat Peraturan Presiden dan membuat secara khusus dokumen mengenai Diplomasi Maritim
2. mendiseminasikan Kebijakan Kelautan Indonesia
3. melakukan program peningkatan budaya maritim secara nasional salahsatunya melalui ENJ. ENJ itu sendiri berkeliling ke sebagian besar provinsi di indonesia.

4.2.3 Implementasi KRI Dewa Ruci dalam mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Poros Maritim Dunia

Selama KRI Dewa Ruci melaksanakan muhibah keluar negeri, KRI Dewa Ruci selalu mendapatkan sambutan yang hangat dari seluruh warga di negara tersebut. Hal itu juga tidak terlepas dari keramahan, dan kerja keras profesionalisme dari seluruh prajurit KRI Dewa Ruci ketika menyuguhkan tampilan yang begitu menghibur mata. Adapun *feedbacknya* TNI Angkatan Laut sering mendapatkan kunjungan kerja dari Angkatan Laut negara sahabat karena terbukti keikutsertaan TNI AL misalnya dalam even latihan seperti Naval Exercise Komodo bulan Mei 2018 yang diikuti oleh 45 Angkatan Laut negara sahabat.⁷⁶ Hal tersebut juga semakin meningkatkan *capacity building* dan *bargaining position* TNI Angkatan Laut yang patut diperhitungkan dalam kancah Angkatan Laut dunia internasional.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ini KRI dewa Ruci juga telah Mengikuti rangkaian *Tall Ship Race* mulai dari

⁷⁶ Wawancara dengan Asops Mabes AL secara korespondensi melalui email pada 4 September 2018.

Yunani dan di berbagai negara lainnya seperti Belgia, Denmark, Norwegia, Inggris, Perancis dan Belanda. *Event* besar *Tall Ship Race* ini juga sekaligus memberikan kesempatan kepada KRI Dewa Ruci untuk tampil di dunia Internasional. Kegiatan yang dilakukan oleh KRI Dewa Ruci diantaranya:⁷⁷

- a. *The Historical Seas Tall Ships* Regatta 2010 dengan rute Yunani-Bulgaria-Istanbul (Turki)
- b. *The Tall Ships Race* 2010 dengan rute Antwerp (Belgia)-Aalborg (Denmark)-Kristiansand (Norwegia)-Hartlepool (Inggris).
- c. *Festival Sail* Amsterdam di Belanda
- d. *Sail* Bremerhaven di Jerman
- e. *Festival International* Mediferraneo and Velieri di Italia
- f. KRI Dewa Ruci juga pernah digunakan dalam pembuatan film *Anna and The King* yang dibintangi Jodie Foster tahun 1999
- g. Penampilan KRI Dewa Ruci oleh para kadet AL ini yaitu pertunjukan tari reog ponorogo, tarian minang, tari saman, tari rampak kendang dan tari perang Papua
- h. Acara “Cocktail Party” di setiap kunjungan ke negara sahabat di KRI Dewa Ruci dengan menyediakan bakso sapi dan nasi goreng untuk para tamu yang hadir di acara tersebut. Hal ini juga sebagai wujud upaya diplomasi dalam bidang makanan.

Beberapa penghargaan diantaranya yang peneliti dapat saat melakukan wawancara dan studi literatur dokumentasi di KRI Dewa Ruci:

- a. Kapal Layar dengan formasi terbaik saat berlabuh *The Most Spectacular Entrance* pada *Tall Ships races* 2010 di kota Kristiansand-Norwegia
- b. Juara I olahraga cabang tenis meja pada *Tall Ships races* 2010 di kota Kristiansand-Norwegia
- c. Juara I voli pantai *Tall Ships races* 2010 di kota Kristiansand-Norwegia

⁷⁷ Wawancara dengan Komandan KRI Dewa Ruci di Tanjung Priok Jakarta, pada 10 Agustus 2018.

- d. Juara I Soda party *Tall Ships races* 2010 di kota Kristiansand-Norwegia
- e. Kapal terbaik dalam parade pada *Tall Ship race* dari Antwerp di Belgia ke Aalborg di Denmark
- f. Peserta terjauh pada *Tall Ship race* dari Antwerp di Belgia ke Aalborg di Denmark
- g. Juara I pertandingan basket internasional pelaut pada *Tall Ship race* dari Antwerp di Belgia ke Aalborg di Denmark
- h. Juara penampilan terbaik “ *The Best Crew Parade*” pada *Tall Ship Race* Hartlepool di Inggris saat perjalanan dari London karena menampilkan Reog Ponorogo
- i. Tahun 2017 Desember melakukan Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) KRI Dewa Ruci diikuti oleh 68 pelajar kelas XII dari 34 provinsi se Indonesia (program Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman)

Misi diplomasi yang dibawa oleh KRI Dewa Ruci dalam setiap muhibahnya ini ditujukan untuk memperkenalkan besarnya dunia kemaritiman di Indonesia dan keberanekaragaman potensi kebudayaan dan kesenian yang ada di Indonesia secara internasional. Bahkan Duta Besar RI di PBB saat itu LN. Palar yang ikut menyambut KRI Dewa Ruci di New York mengatakan bahwa satu kali kunjungan KRI Dewa Ruci ke New York menyamai usaha diplomasi selama 10 tahun.⁷⁸ Sejak tahun 1953 pelayaran pertama dari Jerman ke Indonesia membawa KRI Dewa Ruci sudah beberapa kali misi muhibah ini dilakukan diantaranya data riwayat perjalanan KRI Dewa Ruci yang coba peneliti himpun saat melakukan wawancara dengan Komandan KRI Dewa Ruci di Jakarta bisa dilihat di bagian lampiran.

Sebagaimana diketahui bahwa diplomasi pertahanan merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerja sama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan yang ditujukan untuk membangun CBM terhadap negara sahabat yang dikunjungi. Hasil wawancara dengan

⁷⁸ Dispenal. 2016. KRI Dewa Ruci Sang Legenda. Jakarta: Mabes AL Dispenal

Asops Mabes AL juga menjelaskan bahwa terdapat tiga karakteristik tujuan yang dapat mengidentifikasi makna dari diplomasi pertahanan, yakni *confidence building measures (CBMs)*, *civil-military relation* dan *wider foreign policy objectives in the other countries' area of defense*. Dalam rangka mencegah potensi konflik, yang dapat dilakukan adalah dengan saling memberikan pemahaman atas persepsi masing-masing. Dalam konteks ini Asops Mabes AL yang diwakili oleh Paban II menjelaskan bahwa :

KRI Dewa Ruci telah berhasil mengemban misi diplomasinya khususnya diplomasi pertahanan secara efektif, parameternya adalah bahwa muhibah yang dilakukan telah mampu mencapai kesepahaman (kepercayaan) dari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan CBMs terutama dalam rangka menciptakan perdamaian terutama dengan negara-negara yang dikunjungi. Namun, kita berharap perlu juga evaluasi dalam kebijakan diplomasi pertahanan secara khusus.⁷⁹

Hasil temuan lapangan menyebutkan bahwa implementasi diplomasi pertahanan dalam kegiatan KRI Dewa Ruci sudah berjalan efektif, namun belum adanya evaluasi kebijakan mengenai diplomasi pertahanan. Peningkatan diplomasi pertahanan dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh menguatnya kerjasama pertahanan antar negara guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi, termasuk ancaman non tradisional. Namun disayangkan, perkembangan demikian belum diikuti oleh kegiatan evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia.

Mendukung kesuksesan visi Poros Maritim Dunia saat ini merupakan agenda utama Tentara Nasional Indonesia, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah RI periode 2014-2019. Visi PMD diharapkan integral dengan sistem pertahanan beserta pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan. Keberhasilan visi ini akan dapat dicapai tidak saja oleh keberpihakan kebijakan pemerintah, namun juga

⁷⁹ Wawancara dengan Asops Mabes AL secara korespondensi melalui email pada 4 September 2018.

karena dua hal; pertama, ketegasan diskursus tentang arah dan kerangka praktis konsep Poros Maritim Dunia dari pemerintah; dan kedua, sinkronisasi antara pembangunan maritim dan sistem pertahanan negara yang menjadi domain TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dan sebagai salah satu komponen bangsa yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan strategis negara pada lingkup nasional, regional maupun global.⁸⁰ Dengan demikian, pembangunan kapabilitas TNI Angkatan Laut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari skema pencapaian Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

4.3 Pembahasan

4.3.1 KRI Dewa Ruci dalam melaksanakan Diplomasi

Secara universal peran hakiki Angkatan Laut adalah sebagai kekuatan militer yang berfungsi untuk mampu melaksanakan pengendalian wilayah, menangkal serangan musuh serta apabila diperlukan dapat menghancurkannya dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara di laut. Seiring perkembangannya Angkatan Laut memiliki tiga fungsi utama menurut Ken Booth dalam bukunya *Navies and Foreign Policy* dimana fungsi tersebut sebagai “Trinitas Angkatan Laut”. Adapun trinitas angkatan laut ini yakni kekuatan militer, diplomasi dan polisionil, dimana ketiganya saling bersinergi dan mendukung dalam setiap operasi militer yang digelar dan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan maritim.⁸¹ Peran militer ada ditujukan karena karakter daripada angkatan bersenjata dari Angkatan Laut itu sendiri, kemudian peran diplomasi ialah digunakan untuk melaksanakan tujuan politik suatu negara dan peran polisionil berkaitan dengan penegakan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi serta perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dari penjelasan tersebut mempertegas pendapat bahwa pembentukan

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*, London: Croom Helm, Ltd, 1977, Hal 15

angkatan laut secara kualitatif harus mampu melaksanakan ketiga peran universal tersebut.

Sementara berdasarkan Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dikatakan bahwa tujuan daripada pertahanan negara adalah untuk menjaga kedaulatan negara, memelihara integrasi wilayah dan melindungi keselamatan bangsa.⁸² Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sehingga semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut. Oleh karena itu pertahanan negara ini berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah sebagai satu kesatuan pertahanan.⁸³

Dalam upaya mencapai tujuan pertahanan negara tersebut serangkaian penyelenggaraan komprehensif dan bersifat terus menerus sebagai suatu tindakan maksimal harus didukung dengan postur kekuatan dan susunan pertahanan negara. TNI berperan sebagai komponen utama pertahanan negara yang memiliki fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut. Penjabaran daripada fungsi TNI tersebut dijabarkan kedalam tugas-tugas Operasi Militer untuk Perang (*Military Operation*) dan melaksanakan tugas-tugas Operasi Selain Perang (*Military Operation Other Than War*).

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disini TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral dari TNI yang merupakan komponen utama sistem pertahanan negara di laut. Adapun fungsinya ialah mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan negara di laut dan melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut bersama dengan komponen kekuatan pertahanan lainnya. Pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut ini juga

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

⁸³ Aleksius Jemadu, Politik Global dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Graha Ilmu, . 2008

bertujuan sebagai daya tangkal yang bersifat komprehensif terhadap segala bentuk ancaman yang datang baik itu dari luar dan dalam, kemudian pengamanan sumber-sumber kekayaan alam dari pemanfaatan pihak yang tidak bertanggungjawab, serta keseimbangan kekuatan Angkatan Laut Negara baik itu di lingkup regional maupun global sebagai *bargaining power* dalam melaksanakan fungsi *Naval diplomacy*.

Dalam perjalanan sejarah NKRI, TNI Angkatan Laut telah melaksanakan diplomasi angkatan laut untuk memperjuangkan kepentingan nasional pada masa masa perang maupun masa damai. Kegiatan dan operasi Diplomasi Angkatan Laut telah dilaksanakan sejak masa perang kemerdekaan. Di tengah keterbatasan kekuatan kapal-kapalnya dan berada pada posisi asimetris di hadapan armada kapal Belanda, kapal-kapal TNI Angkatan Laut masih mampu melaksanakan diplomasi angkatan laut. Hal ini diperlihatkan saat menjelang Perjanjian Linggarjati di Perairan Cirebon pada bulan November 1946.⁸⁴ Hal ini juga sebagai wujud eksistensi TNI Angkatan Laut pada masa itu.

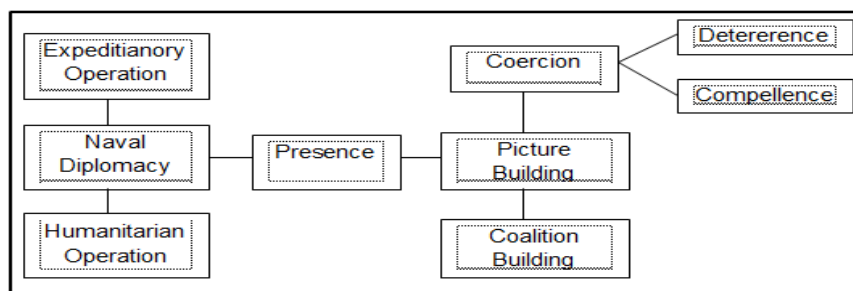
Seiring dengan kehadiran KRI Dewaruci pada tahun 1953, TNI Angkatan Laut memulai tradisi pelayaran muhibah dengan operasi yang bersandi Kartika Jala Krida (KJK) yang sebenarnya merupakan pelayaran pelatihan untuk para taruna Taruna AAL. Pelayaran ini sekaligus mengemban misi diplomasi memperkenalkan Indonesia pada negara - negara yang dikunjunginya. Diplomasi Angkatan Laut merupakan bagian dari trinitas tugas TNI Angkatan Laut yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri.

Diplomasi biasa dilakukan dalam konteks hubungan antar negara dan menjadi pelaksanaan Politik Luar Negeri yang dilakukan oleh sebuah negara dalam memperjuangkan kepentingannya. Pada umumnya pelaksanaan diplomasi dilakukan melalui perundingan-perundingan dengan konten spesifik maupun membahas pada masalah-masalah yang lebih luas. Fungsi dari diplomasi meliputi representasi eksistensi sebuah

⁸⁴ Susanto Zuhdi. *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Jakarta: Komunitas Bambu. hal. 216.

negara, proteksi terhadap kepentingan nasional, observasi dan pelaporan tentang tema-tema strategis yang berpengaruh pada kepentingan nasional. Kemudian juga ikut dalam mempromosikan *political will* pemerintahan sebuah negara, dan menegosiasikan kepentingan sebuah negara dengan pihak lain.

Secara khusus diplomasi mensyaratkan instrumen untuk mampu mempengaruhi pihak lain mengikuti kepentingan nasional suatu negara. Selama ini militer digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memberikan pengaruh pada pihak lain. Secara tradisional, angkatan laut memiliki fungsi diplomasi disamping militer dan polisionil di ranah maritim. Fungsi tersebut dilekatkan pada angkatan laut karena alat utama sistem senjata (alutsista) angkatan laut yaitu kapal perang merupakan representasi negara di manapun kapal itu berlayar. Fungsi daripada diplomasi angkatan laut bisa kita lihat di gambar bagan berikut:



Bagan 4.3 Diplomasi Angkatan Laut
Sumber: Geoffrey Till, 2004

Dalam bagan diatas menunjukkan bahwa komponen-komponen daripada *Naval Diplomacy* untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi Angkatan Laut bertumpu pada kehadiran (*presence*) yang bersifat koersif dan mampu memberikan dampak daya tangkal (*deterrence*) ataupun pemaksaan (*compellence*). Beberapa kegiatan dan operasi yang telah dilaksanakan TNI Angkatan Laut akan menjadi tugas utama (*core duties*) di masa-masa yang akan datang bersama Angkatan Laut negara lain baik itu kerjasama dalam bilateral maupun multilateral. Adapun implementasi kegiatan operasi TNI Angkatan Laut untuk

menjalankan peran diplomasi diselenggarakan untuk membangun kepercayaan (*confidence building*) sesuai jalur formal (*first track diplomacy*) dan jalur informal (*multitrack diplomacy*).

Penggunaan kekuatan angkatan laut untuk keperluan diplomasi tidak hanya melulu untuk keperluan perang, namun dapat berpotensi mendapatkan hal-hal lain atau tujuan diplomasi suatu negara yang seharusnya dilaksanakan oleh departemen pemerintahan atau lembaga lainnya. Kesimpulan ini sesuai dengan apa yang dituliskan Geoffrey Till dalam bukunya *Sea Power*, yaitu Angkatan Laut memiliki rentang kemampuan yang luas sehingga mengharuskan mereka untuk melaksanakan peran-peran yang biasanya sulit dikerjakan oleh Angkatan Militer lain.⁸⁵

Perkembangan konsep pertahanan saat ini bukan hanya untuk militer saja namun lebih luas, seperti ekonomi, pangan, lingkungan, budaya dan manusia (*human*) *security*. Hingga kemudian konsep mengenai diplomasi dan pertahanan juga tidak dapat dipisahkan sehingga muncul istilah diplomasi pertahanan. Diplomasi Pertahanan merupakan terminologi baru dalam hubungan internasional. Menurut Berridge, dalam bukunya *Dictionary of Diplomacy* menjelaskan bahwa Diplomasi pertahanan adalah penggunaan personel militer, termasuk *service attaches*, dalam mendukung pencegahan dan resolusi konflik, termasuk menyediakan bantuan dalam pembangunan angkatan bersenjata yang demokratis dan akuntabel.⁸⁶ Pendapat lain menurut Cottey dan Foster juga mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai suatu kegiatan yang menggunakan kekuatan militer di masa damai serta adanya penggunaan infrastruktur terkait seperti menteri pertahanan sebagai instrumen

⁸⁵ Geoffrey Till, 2004. *Sea Power a Guide for the Twenty-First Century*, Second edition:Routledge

⁸⁶ Berridge, G. R., James, Alan. 2003. *Dictionary of Diplomacy; Second Edition*. New York: Palgrave Macmillan

kebijakan luar negeri maupun kebijakan keamanan.⁸⁷ Secara lebih komprehensif diplomasi pertahanan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya:⁸⁸

- k. Kontak bilateral dan multilateral antara militer senior dan pejabat sipil kementerian pertahanan;
- l. Penunjukkan atase pertahanan ke luar negeri;
- m. Perjanjian kerjasama pertahanan bilateral;
- n. Pelatihan personel militer dan pegawai sipil dari kementerian pertahanan asing;
- o. Penyediaan tenaga ahli dan nasihat dalam kontrol demokratis dari angkatan bersenjata, manajemen pertahanan, dan lingkup teknis militer;
- p. Kontak dan pertukaran antara personel atau unit militer dan kunjungan kapal-kapal;
- q. Penempatan personel militer atau sipil di kementerian pertahanan atau angkatan bersenjata negara mitra;
- r. Pengerahan tim untuk latihan;
- s. Penyediaan perlengkapan militer dan bantuan material lainnya; dan
- t. Latihan militer secara bilateral maupun multilateral.

Secara teoritis, konsep diplomasi pertahanan ini sendiri menawarkan cara-cara preventif untuk mengurangi konflik dengan cara yang lebih *soft power*, dan bukan untuk membangun aliansi dalam melawan pihak lain namun membuka kemitraan dengan semua pihak secara transparansi atau keterbukaan yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan bagi pihak lain. Dalam konsep diplomasi pertahanan itu sendiri ada tiga karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara, yakni *defense*

⁸⁷ Andrew Cottey., Anthony Forster. 2004. *Reshaping Defense Diplomacy : New Roles for Military Cooperation and Assistance*. New York : Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies

⁸⁸ *Ibid*

*diplomacy for confidence building measures (cbm), defense diplomacy for defense capabilities, dan defense diplomacy for defense industry.*⁸⁹

Dalam *defense diplomacy for confidence building measures (cbm)* ini pada tataran negara pada prinsipnya ialah memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan antar kedua belah pihak negara, menjaga hubungan baik kedua negara, dan mengurangi perasaan terancam akan adanya mispersepsi dan konflik, serta merupakan usaha penyelesaian suatu konflik secara damai. CBM ini dapat dilakukan dengan cara kerjasama militer yang merupakan simbol dari keinginan dalam untuk menciptakan kerjasama, membangun persepsi kepentingan bersama, merubah *mindset* militer dari negara lain, serta mendukung perbaikan pertahanan suatu negara. Secara operasional diplomasi pertahanan melalui CBM ini dapat dilakukan melalui kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, pertukaran informasi strategis, pertukaran perwira, pendidikan militer, kesepakatan dalam kerjasama atau nota kesepahaman dan latihan bersama.

Keberhasilan hubungan diplomasi pertahanan yang baik dalam hal CBM akan membentuk kondisi lingkungan yang saling mempercayai antar pihak. Dalam hasil temuan di lapangan juga Asops Mabes Angkatan Laut menjelaskan bahwa:⁹⁰

Dalam rangka mencegah potensi konflik, yang dapat dilakukan adalah dengan saling memberikan pemahaman atas persepsi masing-masing. Dalam konteks ini, menurut pandangan saya, KRI Dewa Ruci telah berhasil mengemban misi diplomasinya khususnya diplomasi pertahanan secara efektif, parameternya adalah bahwa muhibah yang dilakukan telah mampu mencapai kesepahaman (kepercayaan) dari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan CBMs terutama dalam rangka menciptakan perdamaian terutama dengan negara-negara yang dikunjungi.

⁸⁹ Andrew Cottey dan Anthony Forster. 2004. "Chapter 1: Strategic Engagement: Defense Diplomacy as a means of Conflict Prevention". New York: Routledge hal15

⁹⁰ Wawancara dengan Asops Mabes AL secara korespondensi melalui email pada 4 September 2018.

Pada pelaksanaan muhibahnya KRI Dewa Ruci menjalankan fungsi diplomasi pertahanan dan CBM, hal ini bertujuan agar dapat membangun hubungan yang lebih baik kepada negara sahabat. Kemudian adanya muhibah KRI Dewa Ruci ini juga dapat meminimalisir potensi risiko konflik sekaligus meningkatkan kepercayaan diantara kedua negara. Muhibah KRI Dewa Ruci bukan pertama-tama perlu dilihat dalam konteks pertahanan tetapi juga budaya. Melalui pengiriman KRI Dewa Ruci ini, TNI Angkatan Laut membawa serta budaya Indonesia di mata internasional. Diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh kapal latihan taruna TNI Angkatan Laut ini terealisasikan dalam berbagai aktivitas budaya yang dipertunjukkan oleh atraksi para taruna di hadapan masyarakat internasional saat kapal tersebut singgah di pelabuhan negara lain.

Aktivitas budaya yang dilakukan oleh atraksi para cadet taruna Angkatan Laut ini merupakan salah satu contoh konsep *soft power* yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Konsep *soft power* ini dijelaskan oleh Joseph Nye dalam bukunya *Public Diplomacy and Soft Power* yang menjelaskan bahwa ada cara lain untuk mempraktekkan *power* selain dengan memerintah, memaksa, memberikan imbalan yaitu dengan *attraction* (memikat). Proses *attraction* inilah yang disebut dengan Joseph Nye konsep *soft power*. Nye mendefinisikan *soft power* sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments*”.⁹¹ Menurut Nye *soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus dengan cara paksaan atau imbalan namun melalui *attraction*. Dalam hal ini, *Power* tidak hanya berupa perintah atau paksaan, namun *power* adalah kemampuan untuk membuat pihak lain melakukan hal yang tidak diinginkannya dan dapat menguntungkan kita. Kemampuan untuk

⁹¹ Joseph S. Nye, Jr. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. Public Affairs: New York. Hal 94

membentuk sebuah *attraction* ini cenderung dikaitkan dengan aset-aset yang tak terlihat seperti kepribadian yang menarik, budaya, nilai dan institusi politis, dan kebijakan-kebijakan yang terlihat didasarkan pada hukum yang benar dan memiliki otoritas moral.

Attraction seperti yang telah dijelaskan oleh Nye ini bisa diimplementasikan berupa tindakan yang dilakukan oleh kadet Taruna Angkatan Laut melalui atraksi parade budaya dan kesenian saat KRI Dewa Ruci singgah di suatu negara. Hadirnya KRI Dewa Ruci diharapkan mampu untuk menjadi duta atau perwakilan negara Indonesia di mata internasional. KRI Dewa Ruci sudah menjadi duta bagi Indonesia, tidak hanya dalam konteks diplomasi pertahanan tetapi juga kebudayaan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan negara Indonesia, baik diplomasi pertahanan maupun kebudayaan menjadi sulit dipisahkan. Dalam konteks diplomasi pertahanan, KRI Dewa Ruci hadir di berbagai festival serta latihan kapal layar militer internasional. Dalam kesempatan ini, berbagai tugas diplomasi pertahanan mampu terealisasi melalui kunjungan pelayaran KRI Dewa Ruci ke berbagai negara antara lain:

Sebagai fungsi representatif yakni keterlibatan KRI Dewa Ruci bukan saja dipahami sebagai kehadiran atau perwakilan TNI Angkatan Laut tetapi lebih daripada itu, merupakan suatu kehadiran atau perwakilan dari Indonesia. Kehadiran ini penting untuk menunjukkan bukan hanya daya juang, pertahanan, dan kebudayaan Indonesia itu sendiri tetapi juga menunjukkan upaya merealisasikan kepentingan nasional Indonesia di wilayah internasional. Kehadiran Indonesia melalui keterlibatan KRI Dewa Ruci sesungguhnya terbilang efektif dewasa ini, mengingat adanya pergeseran visi Indonesia dari bangsa agraris menuju bangsa maritim.

Sebagai fungsi negosiasi dan peningkatan CBM, dalam wawancara peneliti dengan Komandan KRI Dewa Ruci, dijelaskan bahwa salah satu keuntungan dari pengiriman kapal layar KRI Dewa Ruci adalah ketika TNI Angkatan Laut dapat bertemu dengan pihak angkatan laut dari negara lain. Pertemuan ini tak jarang juga dipergunakan untuk membicarakan

berbagai hal yang disesuaikan dengan kepentingan nasional pada umumnya, dan kepentingan TNI Angkatan Laut secara khusus. Kepentingan TNI Angkatan Laut biasanya terealisasi dengan adanya pembicaraan mengenai kerjasama dan latihan militer bersama. Sementara latihan militer bersama tersebut secara tidak langsung meningkatkan rasa saling percaya (*CBM*) yang memang adalah salah satu tujuan utama dari diplomasi pertahanan.

Kemudian dalam peningkatan kredibilitas dan *capacity building*. Dengan semakin banyaknya keterlibatan KRI Dewa Ruci dalam berbagai latihan bersama maupun festival internasional, maka akan semakin meningkat pula kemampuan dan kredibilitas dari para taruna TNI Angkatan Laut. Pengakuan akan kemampuan dan kredibilitas dari para taruna TNI Angkatan Laut pun akan meningkatkan pula pengakuan dan kredibilitas Indonesia di mata internasional. Indonesia sendiri melalui KRI Dewa Ruci sudah terbukti memiliki kemampuan yang handal di bidang pelayaran. Hal tersebut bisa terlihat dari berbagai prestasi yang didapatkan oleh KRI Dewa Ruci dalam berbagai festival internasional. Semua penghargaan yang diterima dari tahun ke tahun oleh KRI Dewa Ruci semakin memperkuat posisi Indonesia di mata dunia khususnya dalam konteks kekuatan maritim. Hal tersebut tentu sekali lagi menguntungkan jika terus dikembangkan mengingat fokus pemerintah Indonesia yang juga ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

4.3.2 KRI Dewa Ruci sebagai Implementasi pilar-pilar Poros Maritim Dunia

Dalam menjalankan berbagai kegiatan Diplomasi Pertahanan yang sebelumnya sudah dijelaskan, TNI Angkatan Laut tidaklah berdiri sendiri melainkan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti misalnya, Mabes TNI, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan RI. Melalui wawancara penelitian, peneliti menemukan bahwa selalu ada koordinasi antara TNI Angkatan Laut, Mabes TNI, dan Kementerian Luar

Negeri ketika akan dilaksanakan operasi pelayaran dari KRI Dewa Ruci. Setiap operasi layar yang dijalankan oleh KRI Dewa Ruci termasuk keikutsertaan dalam berbagai festival internasional berada dalam koordinasinya Mabes TNI Angkatan Laut.

Sementara itu, kedutaan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan hal-hal prosedural dari negara tersebut. Salah satu contoh pentingnya keterlibatan kedutaan dalam operasi pelayaran KRI Dewa Ruci adalah saat perizinan berlabuh KRI Dewa Ruci di pelabuhan yang menjadi pusat militer Angkatan Laut Amerika Serikat ketika KRI Dewa Ruci harus berlayar ke wilayah Hawaii. Padahal, terdapat pelabuhan publik yang bisa digunakan oleh pihak KRI Dewa Ruci. Namun atas mediasi kedutaan Indonesia bagi AS, pihak KRI Dewa Ruci diizinkan untuk berlabuh di pusat militer Angkatan Laut AS di Hawaii.

Dalam konteks pemerintahan saat ini yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, KRI Dewa Ruci juga bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang secara khusus menjadi tonggak dalam penciptaan visi Indonesia Poros Maritim Dunia. Memahami eksistensi Indonesia tidak bisa tanpa dipahami bahwa sejarah Indonesia ialah sebagai bangsa maritim. Dalam persepektif itu yang kemudian gagasan mengenai Poros Maritim Dunia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, namun memiliki landasan ideologis, yuridis konstitusional, historis, sosio-antropologis, geografis dan geostrategis.⁹²

Adapun secara filosofis ideologis tersirat dalam Pancasila utamanya sila ketiga dan kelima. Kemudian landasan historis ini bisa kita lihat dari kejayaan-kejayaan maritim sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, tetapi juga budaya maritim sebagai bangsa bahari yang sangat kuat warisan zaman nenek moyang kita. Bagi bangsa Indonesia tanah dan air adalah satu, sehingga muncullah konsepsi tentang Wawasan Nusantara yang berhasil diperjuangkan dan diakui oleh PBB sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional. Secara historis, sosio-antropologis dan

⁹² Bernhard Limbong. 2015. Poros Maritim. Jakarta: Margaretha Pustaka hal.6

geografis dan geopolitik digambarkan juga saat penyampaian pidato peresmian Institut Angkatan Laut pada tahun 1953 oleh Presiden Soekarno dimana dalam pidatonya berjudul “Jadilah Bangsa Pelaut”! dalam pidato tersebut Bung Karno menegaskan: Untuk menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera, kita harus menjadi bangsa bahari.⁹³

Visi Poros Maritim Dunia menggambarkan pemahaman terhadap geostrategis dan geopolitik Indonesia di percaturan dunia, sehingga Poros Maritim Dunia merupakan doktrin politik luar negeri masa kini dan masa depan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang menyejahterahkan rakyat sekaligus dihormati bangsa-bangsa lain. Saat ini bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim) Pemerintah Indonesia telah merumuskan Kebijakan Kelautan Indonesia melalui Perpres RI No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang di dalamnya memuat 7 pilar. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana KRI Dewa Ruci dalam mengemban misi TNI Angkatan Laut melalui pilar yang ada di Kebijakan Kelautan Indonesia yakni pilar pertama, pilar keenam dan pilar ketujuh.

Pilar ke-1 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia salah satunya seperti yang tercantum dalam Kebijakan Kelautan Indonesia ada di pilar pertama yakni pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Disini peneliti mencoba menganalisis hasil temuan yang di dapat utamanya dalam pengembangan sumber daya manusia pada KRI Dewa Ruci. Dari hasil temuan didapat bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia ini, kadet taruna Angkatan Laut menjadi sasaran utamanya, hal ini berkaitan dengan setiap

⁹³ Disampaikan Bung Karno dalam pidato pada Hari Armada di dermaga Angkatan Laut, Surabaya dalam buku Bung Karno dan Abri,1989,CV Masagung dalam Bernhard Limbong.,Op.Cit hal 7

muhibah yang dilakukan para kadet tidak hanya belajar astronomi, belajar tentang perkapalan, namun mereka juga menyerap ilmu dari berbagai sektor misalnya mereka semakin paham mengenai perbedaan kualitas Angkatan Laut negara satu dengan negara lainnya, mereka belajar mengenai karakter suatu bangsa dengan bangsa lainnya, kemudian mereka bisa melihat disparitas negara maju dan negara berkembang, mereka juga belajar interaksi komunikasi dan diplomasi yang baik. Dengan adanya muhibah KRI Dewa Ruci ini juga sebagai momentum bagi mereka untuk menyerap banyak ilmu yang kemudian akan diterapkan kedepannya di Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia ini juga dibangun untuk menciptakan suatu karakter bangsa. Karakter bangsa pada intinya merupakan identitas nasional atau jati diri yang melekat pada bangsa tersebut. Identitas nasional atau jati diri suatu bangsa, pada hakikatnya ialah penjelasan tentang nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Untuk itu pemerintah disini mengupayakan untuk membangun karakter bangsa dengan strateginya seperti yang tercantum dalam point (f) di strategi pengembangan sumber daya manusia lampiran Kebijakan Kelautan Indonesia bahwa disebutkan Peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenjang pendidikan.

Pentingnya kesadaran akan pemahaman mengenai kelautan inilah yang nantinya akan menjadikan karakter bangsa maritim, bangsa yang memanfaatkan laut dengan baik mampu mengeksplorasi laut yang dimilikinya untuk kesejahteraan bersama. Namun, kecendrungan sikap dan pemahaman yang masih berkembang di masyarakat Indonesia ialah melihat daratan sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah usaha yang bergerak di bidang kelautan masih rendah dibanding usaha lainnya dan disparitas jumlah petani lebih besar daripada jumlah nelayan. Kemudian, hasil temuan peneliti di lapangan juga persis seperti yang disampaikan oleh Deputi Kedaulatan Maritim di

Kemenkomaritim yang menyebutkan bahwa hasil di lapangan sosialisasi para pihak Kemenkomaritim ke sejumlah sekolah dasar yang mereka suruh menggambar, hanya 2% murid sekolah dasar tersebut yang menggambar berhubungan dengan laut, rata-rata mereka menggambar sawah dan pegunungan. Lebih lanjut indikator kedua yang diberikan oleh Kemenkomaritim terhadap para siswa yang akan ikut pelayara ENJ juga diberi pertanyaan tentang sudah pernah naik kapal atau belum, dan jawaban dari mereka hampir semuanya menjawab belum, hanya mungkin 5% dari peserta yang hadir yang sudah pernah merasakan naik kapal.

Struktur mental dan pengetahuan seperti ini lah yang kemudian berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan potensi laut yang sangat besar di Indonesia. Belum lagi persoalan belum meratanya tingkat pendidikan yang tersebar di beberapa daerah terpencil dan terluar juga menjadi pekerjaan besar kita untuk membangun bangsa yang berkarakter maritim. Seharusnya, untuk mengelola sumber daya laut yang kaya ini dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai bidangnya, karena pengelolaan sumber daya pesisir dan laut membutuhkan penerapan teknologi, mulai dari teknologi yang sederhana sampai teknologi yang canggih.

Pemerataan pendidikan yang berkualitas di semua daerah di Indonesia termasuk daerah terluar dan terpencil hingga pesisir akan membantu terbentuknya sumber daya manusia yang handal dan berkarakter. Kemudian juga pemerintah disini harus bersinergi dengan kementerian lain dalam memberikan fasilitas dan mutu pendidikan melalui proses pengajaran serta peran optimal pengajar di semua jenjang pendidikan yang ada sehingga dapat mendorong pemberdayaan sektor kelautan yang menjadi landasan pembangunan peradaban bangsa.

Hadirnya KRI Dewa Ruci untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia khususnya para kadet Angkatan Laut merupakan sebuah upaya bagi pembangunan *capacity building*, karena tidak semua Angkatan Laut negara lain yang mahir mengoperasikan kapal layar dan melakukan

sejumlah pelayaran yang cukup jauh dengan kondisi peralatan yang memang tidak di design dengan *high technology*. Hal ini juga karena kapal KRI Dewa Ruci di desain merupakan kapal latihan yang diperuntukkan para taruna dalam melakukan pelayaran baik itu di dalam maupun di luar negeri. Namun, meski kapal ini di desain bukan dengan *high technology* para kadet juga harus tetap dibekali dengan pengetahuan mengenai *technology* dan pengetahuan tentang *electronic warfare*. Konteks perang saat ini bukan dengan *head to head* lagi namun perang siber dan perang elektronik merupakan salah satu perang yang kontemporer dan dengan jarak jauh sytem bisa merusak navigasi kendali suatu kapal yang sedang berlayar di lautan hal itupun yang kemudian akan membahayakan keselamatan para awak kapal.

Pilar ke-6 Budaya Bahari

Keterkaitan antara Poros Maritim Dunia dan Budaya bahari bangsa Indonesia sangatlah erat. Kebijakan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia tanpa disokong oleh budaya bahari bangsa Indonesia seperti halnya cita-cita yang hampa, karena sejarah dan pengalaman masa lalu telah membuktikan bahwa kejayaan berbagai bangsa di Nusantara ini karena disokong oleh budaya baharinya. Budaya bahari perlu diperkenalkan kembali, dibangkitkan dan diimplementasikan dalam kehidupan keseharian, sehingga hal ini akan mengakibatkan pada perubahan paradigma dalam melihat laut, bukan sebagai batas tetapi sebagai area dimana berbagai aktivitas dan potensi dapat dikembangkan.

Terdapat istilah yang berbeda dalam pilar yang dibawa oleh Presiden Jokowi mengenai Budaya Maritim di lima program Poros Maritim Dunia saat pidatonya usai dilantik menjadi Presiden dan dalam pilar di Kebijakan Kelautan Indonesia yang menyebutkan Budaya Bahari. Peneliti mencoba menjelaskan secara teoritis dan hasil temuan lapangan pengertian keduanya agar bisa lebih jelas.

Budaya Bahari

Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahari terdapat tiga makna yang berbeda. Pertama artinya dahulu kala, kuno yang didapat dari bahasa orang Banjar, Kalimantan. Kedua, bahari berarti elok atau indah dan yang ketiga berarti laut atau kelautan. Kebaharian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut dan kelautan. Namun bahari itu sendiri ialah nama lain dari laut itu sendiri. Bahari adalah segala sesuatu tentang laut yang dapat dilihat dari segi keindahan serta budayanya. Seperti keindahan bahwa laut yang dijadikan sebagai pusat wisata, kearifan budaya lokal yang dapat di jadikan warisan budaya.⁹⁴ Bahari erat kaitannya dengan pariwisata karena bahari memanfaatkan keindahan alam terutama laut sebagai objek wisatanya.

Jika kita menyebut negara bahari maka yang terlintas didalam pikiran kita adalah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke beribu gugusan Pulau, garis pantainya yang sangat panjang serta laut yang luas dimana 75% wilayah Indonesia adalah lautan yang menjadikan Indonesia ialah negara bahari yang terkenal di dunia. Adapun ciri-ciri fisik negara bahari seperti wilayah laut yang luas, memiliki pulau-pulau yang banyak dengan garis pantainya yang panjang sudah dimiliki Indonesia kendati sebagian orang masih mempertanyakan belum adanya pembangunan di sektor bahari yang optimal yang mampu mensejahterahkan rakyat. Budaya bahari berarti segala aktifitas dahulu kala yang berkaitan dengan kelautan.

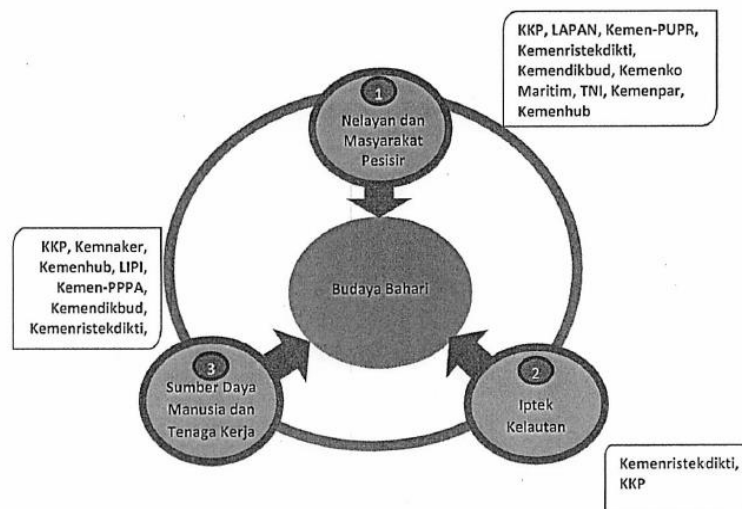
Budaya Maritim

Maritim menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan yang berhubungan dengan kelautan. Pengertian

⁹⁴ Wawancara dengan Kepala bagian Pelaporan Deputi Kedaulatan Maritim di Bogor, pada 13 Agustus 2018.

kemaritiman itu sendiri ialah segala aktifitas atau kegiatan di laut yang menyangkut eksplorasi kelautan untuk pemanfaatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bahasa Inggris kata yang menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut adalah *sea power*. Budaya Maritim adalah gagasan, tindakan, dan produk budaya masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang yang terkait dengan lingkungannya, yaitu laut, pulau, dan pesisir.⁹⁵

Dalam mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia pilar Budaya Bahari ini, program prioritas budaya bahari terdiri dari tiga kegiatan prioritas menurut Lampiran ii Kebijakan Kelautan Indonesia yakni: (1) Nelayan dan masyarakat pesisir (2) Iptek Kelautan dan (3) Sumber Daya Manusia dan tenaga Kerja. Secara skematik, tiga kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.4 Tiga Kegiatan Program Prioritas Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

Sumber : Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, diolah peneliti, 2018

Secara rinci rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia 2016-2019 untuk program prioritas budaya bahari ini sasaran utamanya ialah

⁹⁵ Dr. Adrianus Laurens Gerung Dekan FIB UI dalam wawancara di buletin Cakrawala, Dinas Penerangan Angkatan Laut Edisi 426 tahun 2015

meningkatnya wawasan bahari dan kesejahteraan nelayan dan meningkatnya jumlah pemanfaatan hasil inovasi dan difusi iptek kelautan di industri. Khususnya dalam pilar ini peneliti akan memfokuskan kepadakategori peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Bahwa dalam data Kebijakan Kelautan Indonesia suah terdapat 28.250 orang peserta pendidikan kelautan dan perikanan rentang tahun 2016 dan 2019. Kemudian dalam aspek membangkitkan pemahaman wawasan budaya bahari kegiatan yang dilakukan ialah penyempurnan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan serta penyisipan materi muatan lokal bahari (pengenalan lingkungan laut, pengenalan aktivitas budaya bahari) dan buku untuk semua tingkat pendidikan mulai dari usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan nonformal dan informal. Serta penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui kegiatan pembinaan potensi maritim yakni dengan operasi Pramuka Saka Bahari dan Bintel Juang Remaja Bahari oleh TNI Angkatan Laut melalui KRI, termasuk program ENJ yang secara khusus difasilitasi oleh KRI Dewa Ruci.

Pilar ke-7 Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim memiliki peran penting dalam hubungan antar bangsa, termasuk dalam pengelolaan laut dan samudera yang saling berkaitan, kedaulatan, dan kemandirian pangan, perebutan pengaruh dengan menggunakan matra laut, perbedaan kepentingan antarnegara di laut serta alokasi kedaulatan dan yurisdiksi di laut.⁹⁶ Diplomasi maritim adalah istilah yang berlaku untuk berbagai macam kegiatan di wilayah maritim atau perairan dalam hal ini gugus tugas utamanya ada pada Angkatan Laut suatu negara berdaulat. Pada masa damai diplomasi

⁹⁶ Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019

maritim ini dilakukan untuk mempengaruhi perilaku dari negara lain dalam konteks interaksi dan transaksi yang terjadi di wilayah perairan.

Dengan posisi geostrategis dan geopolitis, Indonesia perlu memiliki *bargaining position* yang kuat dalam melaksanakan politik luar negerinya baik itu di lingkup regional maupun global. Secara umum, diplomasi maritim yang telah dijalankan oleh TNI Angkatan Laut ini misalnya dalam kerjasama bilateral yakni dengan menjalin kerjasama dengan Angkatan Laut negara kawasan terutama yang memiliki perbatasan wilayah laut dengan Indonesia yakni melalui bentuk *Staff Talks* ataupun *Navy to Navy Talk* (NTNT). Diplomasi ini dijalankan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Thailand, Brunei, dan Vietnam.⁹⁷ Selain itu dalam bentuk pertemuan misalnya aktifitas trilateral maupun multilateral misalnya dalam forum Internasional *Western Pasific Naval Symposium* (WPNS) yakni forum kerjasama internasional yang diikuti Angkatan Laut negara-negara di kawasan Asia Pasifik, dilaksanakan dalam bentuk forum simposium, workshop, seminar dan latihan manuver di laut. TNI Angkatan Laut berpartisipasi aktif dalam *International Seapower Symposium* (ISS) yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di US. Naval War College, New Port, Rhode Island.⁹⁸

Kemudian operasi Kartika Jala Krida (KJK) ialah operasi pelayaran navigasi jarak jauh menggunakan KRI Dewa Ruci untuk melatih taruna dan taruni Akademi TNI Angkatan Laut melaksanakan uji ketrampilan bernavigasi astronomi. Setiap tahun KRI Dewa Ruci melaksanakan operasi KJK yang juga sekaligus mengikuti undangan berbagai event sail internasional di berbagai negara. Keberadaan KRI Dewa Ruci ini sudah menjadi legenda dan sekaligus ikon Indonesia di mata dunia dalam komunitas kapal layar internasional karena berkat prestasi dan kehadirannya dalam event-event maritim internasional. Melalui KRI

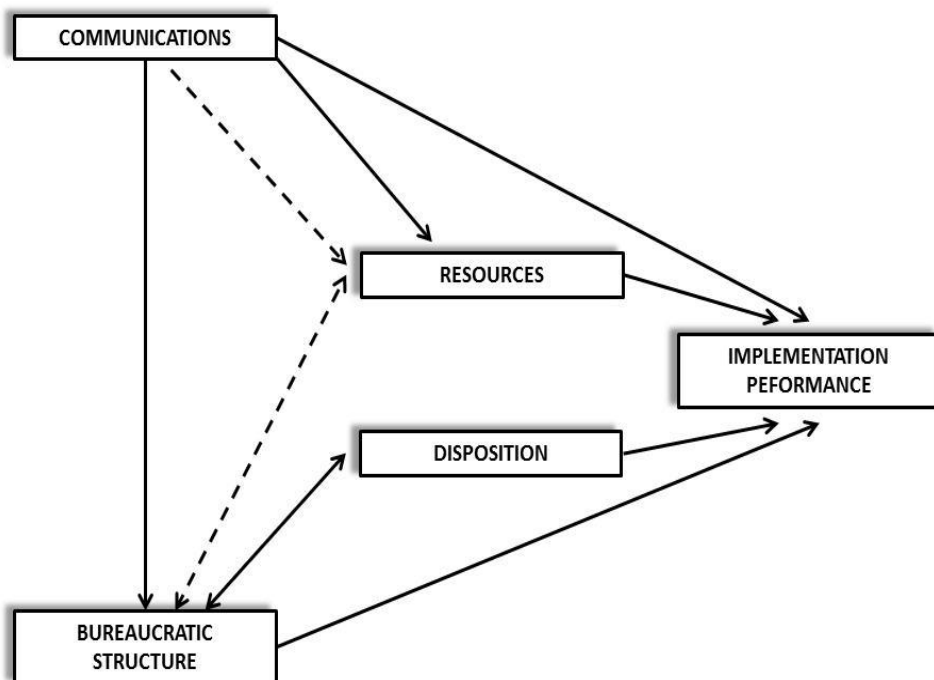
⁹⁷ DR. Marsetio. 2014. TNI Angkatan Laut Berkelas Dunia: Paradigma Baru. Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Laut, hal.19

⁹⁸ *Ibid.*, hal.20

Dewa Ruci TNI Angkatan Laut banyak melakukan diplomasi ke berbagai negara di dunia untuk mempromosikan negara dan bangsa Indonesia.

4.3.3 Implementasi muhibah KRI Dewa Ruci dalam mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Poros Maritim Dunia

Dalam penelitian ini, peneliti memakai model Edward III dalam proses implementasi kebijakan. Menurut model ini, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila empat isu pokok yang berpengaruh yaitu *communication*, *resources*, *disposition or attitude*, dan *bureaucratic structures* dilaksanakan dengan baik.⁹⁹



Gambar 2.2. Implementasi Kebijakan Model Edward III

Sumber: Mulyadi, 2016,hal.69

Komunikasi : secara umum dalam proses komunikasi kebijakan ada 3 hal penting yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi

⁹⁹ Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta:PT. Buku Seru.

dimaksudkan bahwa setiap pembuat kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan yang dibuat dan perintah untuk melaksanakan keputusan tersebut yang telah dikeluarkan. Hambatan yang kerap terjadi dalam proses ini antara lain adanya pertentangan pendapat antara pelaksana dan pengambil keputusan. Kejelasan adalah, untuk menghindari terjadinya interpretasi yang keliru dengan keputusan yang ditetapkan di awal. Konsistensi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi kebijakan, karena ketidakkonsistenan komunikasi akan berakibat pada adanya penafsiran yang keliru dari para pelaksana dan ketidakefektifan implementasi kebijakan.

Hasil temuan lapangan transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam kegiatan Muhibah KRI Dewa Ruci dalam melaksanakan agendanya sudah sangat baik dan mampu diimplementasikan dengan baik karena didukung oleh fungsi dan peran Sops Mabes TNI Angkatan Laut dalam kegiatan muhibah KRI Dewa Ruci yakni:¹⁰⁰

- a. Menyiapkan kesiapan unsur KRI, Personel dan dukungan logistik agar mampu untuk melaksanakan misi diplomasi ke luar negeri, mengingat kegiatan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga kesiapan unsur, personel dan logistik harus benar-benar diperhatikan untuk mencapai kesuksesan misi;
- b. Merencanakan serta membuat jadwal kunjungan muhibah, membuat dan menentukan kegiatan selama muhibah, menentukan rute-rute yang aman untuk di layari; dan
- c. Mengeluarkan perintah untuk melaksanakan kegiatan muhibah

Diplomasi Angkatan Laut merupakan bagian daripada diplomasi pertahanan. Diplomasi Angkatan Laut adalah fungsi diplomasi sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran Angkatan Laut secara universal, sesuai dengan kebiasaan Internasional. Hal ini juga

¹⁰⁰ Wawancara dengan Asops Mabes AL secara korespondensi melalui email pada 4 September 2018.

sesuai dengan teori trinitas Angkatan Laut menurut bukunya Ken Booth. Sehingga sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh. Diplomasi ini diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka mempererat hubungan dan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Angkatan Laut negara-negara sahabat. Pengiriman KRI Dewa Ruci ke berbagai negara ini juga merupakan salah satu implementasi daripada diplomasi pertahanan dalam bentuk diplomasi Angkatan Laut.

Eksistensi daripada peran Angkatan laut mengalami perkembangan, dimana bukan hanya kekuatan *hard power* saja sebagai instrumen untuk menghancurkan kekuatan musuh, namun juga berfungsi sebagai *soft power*¹⁰¹. TNI Angkatan Laut telah melaksanakan kemampuan diplomasi yang diselenggarakan dengan mengkombinasikan antara fungsi *hard power* dan *soft power* sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Joseph Nye pada setiap interaksi dengan negara lain. Diplomasi tersebut menunjukkan hasil nyata ketika secara signifikan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kepentingan nasional sekaligus dapat diterima dan diakui oleh negara-negara di kawasan.¹⁰²

Dalam kenyataannya, konsep *soft power* yang dijalankan melalui diplomasi maritim terbukti sering memberikan hasil nyata dalam mempengaruhi pemikiran negara lain dan menjalin hubungan yang lebih baik antar negara. Seperti misalnya latihan bersama dengan angkatan laut negara lain akan lebih efektif dalam membentuk kapasitas, serta membuat hubungan persahabatan yang lebih baik yang nantinya akan lebih kompatibel dalam melaksanakan operasi bersama. Latihan gabungan dan operasi pengamanan ini juga sekaligus dalam membangun CBM dan tercapainya harmonisasi di antara negara-negara di dunia.

¹⁰¹ Joseph S. Nye. Jr. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs: New York.

¹⁰² DR.Marsetio. 2014. *TNI Angkatan Laut Berkelas Dunia: Paradigma Baru*. Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Laut

Diplomasi yang menggunakan kapal perang dengan menunjukkan kehadirannya dan kekuatannya tanpa perlu mencari atau mempengaruhi kebijakan negara lain ini seperti yang dilakukan oleh KRI Dewa Ruci juga pernah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, yang memerintahkan untuk menerjunkan dua skuadron *battleships* dan kapal perang pengawal mereka untuk di cat putih dan melaksanakan pelayaran keliling dunia mulai Desember 1907 sampai dengan Februari 1909.¹⁰³ Operasi ini disebut *Great White fleet* yang bertujuan utama bahwa Pemerintah Amerika Serikat ingin menunjukkan pesan cinta damai dan sebagai bukti eksistensi bahwa Amerika Serikat mampu menjangkau seluruh dunia. Misi Presiden Roosevelt ini bukan untuk melaksanakan invasi atau konfrontasi dengan negara lain, namun Presiden Roosevelt ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan global baru dengan semboyan diplomasinya yakni *speak softly and carry a big stick*.

Sumber-Sumber : dalam model Edward III yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan antara lain staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Staf menjadi hal yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan, karena disini kualitas yang perlu diperhatikan dalam melihat efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Informasi ialah petunjuk atau panduan jelas tentang kebijakan yang akan diimplementasikan. Sedangkan sumber berikutnya ialah wewenang yakni yang memiliki otoritas untuk menjalankan dan membuat program kebijakan tersebut.

Dalam menjalankan misi muhibah KRI Dewa Ruci yang dimulai sejak tahun 1953, sudah dua kali melakukan misi keliling dunia pertama di tahun 1964 dan tahun 2012. Misi tersebut ditempuh lagi-lagi menjalankan misi diplomasinya hal ini yang juga sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 aline ke IV, ..."ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Dalam

¹⁰³ Michael C Crawford. 2008. The World Cruise of the Great White Fleet. Washington DC: Naval Historical Center, hal.117

pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Disini, Indonesia akan menentukan sendiri posisinya terhadap isu-isu di dunia, dengan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak luar dan ikut berpartisipasi serta berperan aktif dalam upaya membangun dan memelihara perdamaian dunia. Hal tersebut yang menjadi sumber informasi dan wewenang untuk KRI Dewa Ruci dalam melakukan muhibah.

KRI Dewa ruci menjadi kapal latihan yang digunakan oleh Kadet TNI AL tingkat III dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di lembaga pendidikan, jumlah Kadet TNI AL yang mengikuti kegiatan pelayaran bisa mencapai 85-90 orang (Korp Pelaut, Teknik dan Elektronika) dalam satu kali pelayaran muhibah keluar negeri yang dilaksanakan hampir tiap tahun.

Dalam hasil temuan lapangan melalui wawancara dengan Komandan KRI Dewa Ruci bahwa KRI Dewa Ruci dibangun sebagai kapal latihan para taruna Angkatan Laut untuk meningkatkan kemampuannya dalam kegiatan pelayaran, TNI Angkatan Laut juga mengemban misi diplomasi sehingga KRI Dewa Ruci juga digunakan sebagai media diplomasi Indonesia di mata dunia. Pesan yang dibawa dalam setiap kegiatannya, bahwa Indonesia ialah negara yang damai, selain itu bentuk promosi bahari Indonesia, bahwa negara tersebut sangat kaya akan potensi launya, beragam budaya dan keseniannya. Dan tak kalah penting ialah sebagai wujud eksistensi Angkatan Laut Indonesia yang mumpuni dan tangguh sekaligus mencitrakan bahwa Indonesia memang negara maritim yang kedepannya akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Selain dalam konteks diplomasi pertahanan, pengiriman KRI Dewa Ruci erat kaitannya dengan diplomasi kebudayaan. Baik diplomasi pertahanan maupun kebudayaan yang dilaksanakan oleh pihak TNI sama-sama dilaksanakan untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam realisasinya, hal tersebut tidak hanya terlihat dari keikutsertaan dalam

festival internasional tetapi juga terlihat dalam acara-acara yang dibuat oleh KRI Dewa Ruci. Budaya Indonesia sebagai bagian dari Indonesia pun tidak luput dari perhatian masyarakat internasional melalui pertunjukan yang ditawarkan oleh kapal bersangkutan. Misalnya, adanya *cocktail party* yang dilaksanakan di dek kapal Dewa Ruci, dimana pada saat bersamaan ditampilkan berbagai tarian khas Indonesia yang dapat dinikmati oleh perwakilan dari negara sahabat. Selain perwakilan dari militer maupun pemerintahan negara sahabat, masyarakat lokal di negara tersebut pun dapat menikmati dan mendapatkan pengetahuan akan keanekaragaman serta keunikan budaya Indonesia.

Para taruna TNI Angkatan Laut biasanya akan menampilkan berbagai tarian khas Indonesia seperti saman, tarian perang hingga reog ponorogo sebagai salah satu realisasi tugas mereka sebagai duta budaya di tempat yang mereka singgahi. Tidak hanya budaya dalam bentuk tarian saja yang dipersembahkan oleh para taruna TNI Angkatan Laut tetapi juga sikap santun dan ramah. Hal tersebut menurut narasumber dan data data sekunder yang mendukung menjadi salah satu nilai tambah yang dimiliki oleh para TNI Angkatan Laut. Sehingga tidak mengherankan jika semakin banyak orang dari negara lain yang menganggap bahwa sikap santun dan ramah sudah menjadi jati diri masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini juga yang nantinya akan membangun karakter bangsa Indonesia.

Disposisi atau kecenderungan : dalam hal ini yang menjadi penekanan terkait dengan disposisi atau kecenderungan adalah watak dan karakter dari para implementor (komitmen, kejujuran, dan sifat terbuka). Komitmen TNI Angkatan Laut untuk menjalankan misi muhibah KRI Dewa Ruci ini dalam mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia terbukti dalam hasil temuan lapangan wawancara dengan Kadiv Bahari KRI Dewa Ruci yang menjelaskan bahwa para kadet ini juga berpotensi sebagai wujud implementasi dari pilar pertama tentang pengembangan sumber daya

manusia utamanya dalam bidang kelautan. Handalnya prajurit Angkatan Laut dalam mengarungi samudera dan mengoperasikan nakhoda hingga berlayar jauh ke negara-negara di dunia juga mendorong untuk mendukung menjadikan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia.

Bureaucratic structures : birokrasi diartikan sebagai badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Implementasi selanjutnya dalam promosi budaya bahari yang juga sesuai dengan pilar ke enam dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu terdapat dalam kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kesepakatan dengan TNI Angkatan Laut Nomor PK.01/KS.001/WM.PEK/2012 tentang Promosi *Wonderful* Indonesia di KRI Dewa Ruci.¹⁰⁴ Dalam nota kesepakatan tersebut ditujukan untuk mensukseskan pariwisata Indonesia melalui *Wonderful Indonesia* serta pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara sehingga diperlukan kerjasama promosi pariwisata Indonesia tersebut melalui muhibah KRI Dewa Ruci pada KJK tahun 2012. Kegiatan tersebut dengan cara para Kadet dan Anak Buah Kapal akan mengadakan pagelaran kesenian Indonesia seperti misalnya tari-tarian tradisional Indonesia, repak Gendang, Kesenian Reog Ponorogodan Parade pada point-point tertentu di depan para penggemar KRI Dewa Ruci yang nantinya kegiatan tersebut memberikan dampak pencitraan Indonesia di mata Internasional serta memperkuat promosi *word of mouth*. Kemudian juga memberikan souvenir eksklusif dan souvenir umum untuk dibagikan kepada para pecinta KRI Dewa Ruci di pelabuhan yang disinggahinya serta menyiapkan juga *Cocktail Party*. Hal inilah yang kemudian sebagai media

¹⁰⁴ Himpunan Naskah Kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Instansi Terkait, Perguruan Tinggi dan Swasta tahun 2012, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan Kepegawaian Sekretariat jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

promosi budaya bahari dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Kemudian keikutsertaan KRI Dewa Ruci dalam Sail sabang dalam program Kemenkomaritim melalui ENJ tahun 2016. Serta partisipasi KRI Dewa Ruci dalam mempromosikan Indonesia ialah saat memeriahkan Asian Games tahun 2018 dimana Indonesia yang juga menjadi tuan rumah dalam perhelatan ajang olahraga terbesar tersebut. KRI Dewa Ruci bersandar di Pelabuhan Boombaru, Palembang. Untuk menyambut perhelatan acara olahraga terbesar tersebut KRI Dewa Ruci juga membuka kegiatan *Open Ship*, dimana para pengunjung bisa bebas masuk untuk melihat dan mendalami soal sejarah Kapal KRI Dewa Ruci. Kemudian KRI Dewa Ruci juga digunakan sebagai background lomba layar dan jetski di Ancol.

Operasi muhibah KRI Dewa Ruci ini merupakan implementasi dari komitmen bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dan sekaligus membina hubungan baik antar angkatan laut sesuai dengan konsep daripada Diplomasi Pertahanan yakni membangun CBM di setiap kegiatan operasinya. Dalam setiap muhibahnya KRI Dewa Ruci mengusung misi diplomatik yakni memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat internasional. Menarik disini ialah pada saat masa perjuangan pembebasan Irian Barat, muhibah KRI Dewa Ruci berhasil menarik simpati masyarakat Internasional sehingga berdampak positif bagi diplomasi luar negeri Indonesia. Dengan adanya muhibah KRI Dewa Ruci ini masyarakat akan tumbuh kepercayaan melalui pesan damai yang disampaikan disetiap muhibahnya.

Kemudian wujud diplomasi yang dilakukan melalui *smart power* oleh KRI Dewa Ruci ialah pada saat kunjungan pertama KRI Dewa Ruci ke Lisbon (Portugal), seperti yang kita ketahui Indonesia dan Portugal dulu sempat menjalin hubungan di tahun 1950, namun kemudian memutuskan hubungan diplomatik di tahun 1965. Alasan pemutusan hubungan tersebut ialah untuk menghindari kritik negara-negara anggota Gerakan

Non Blok bahwa Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan negara penjajah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Non Blok. Kemudian tahun 1999 Indonesia dan Portugal membuka lagi hubungan diplomatik yang sempat terputus pasca masalah Timor Timur.

Menteri Luar Negeri Indonesia dan Portugal di Jakarta, sebagai wujud mengintensifkan kerjasama kedua negara dan memformalkan mekanisme kerjasama.¹⁰⁵ Tahun 2012 Presiden Cavaco Silva mengunjungi Indonesia, hal itu merupakan kunjungan Presiden Portugal pertama sejak tahun 1950. KRI Dewa Ruci merupakan simbol diplomasi yang baik, yang juga mengemban tujuan untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis dengan memandang negara lain bukan sebagai ancaman dan sebaliknya negara lain tidak memandang Indonesia sebagai ancaman. Semua misi yang dijalankan dengan cara-cara damai dan mencegah terjadinya perang terbuka. KRI Dewa Ruci ini juga sebagai simbol dalam kegagahan bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Kualitas personelnya yang mumpuni karena tidak mudah melakukan pelayaran keliling dunia dengan menggunakan kapal layar tradisional.

¹⁰⁵ Profil Negara dan Kerjasama dalam website Kementerian Luar Negeri RI di <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=65> diakses pada tanggal 28 November 2018

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi muhibah KRI Dewa Ruci dalam mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Poros Maritim Dunia. Selama melaksanakan penelitian, peneliti menemukan hasil penelitian dan membuat kesimpulan, sebagai berikut:

1. KRI Dewa Ruci dalam melaksanakan Diplomasi

Secara universal dalam bukunya Ken Booth menjelaskan mengenai teori trinitas Angkatan Laut yakni peran dan fungsi yaitu militer, polisionil dan diplomasi. Secara yuridis fungsi tersebut juga telah tertuang dalam UU No. 34 tahun 2004 Pasal 9, dimana diplomasi menjadi fungsi yang secara khusus diemban oleh TNI Angkatan Laut. KRI Dewa Ruci merupakan kapal latihan bagi para taruna yang juga memegang fungsi bagi TNI Angkatan Laut dalam menjalankan diplomasinya. Kegiatan yang dijalankan oleh KRI Dewa Ruci ini yakni muhibah ke luar negeri dengan menampilkan atraksi budaya dan kesenian daerah Indonesia. Menurut teori Joseph Nye konsep *soft power* ialah cara-cara yang dilakukan dari berbagai sumber misalnya budaya. Melalui aktifitas KRI Dewa Ruci inilah yang kemudian disebut sebagai duta Indonesia yang mempromosikan pariwisata Indonesia dan juga membawa pesan damai ke dunia. Kehadiran KRI Dewa Ruci di laut bukan didasarkan atas persepsi ancaman namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan dalam membentuk opini publik dan membangun kepercayaan antar negara yang disebut dengan *Confidence Building Measures (CBM)*.

2. KRI Dewa Ruci dalam Implementasi dalam pilar-pilar Poros Maritim Dunia

Setiap negara yang mempunyai Angkatan Laut mempunyai kapal latih namun tidak semua negara mempunyai kapal latih dan sekaligus kapal layar yang ikut mempromosikan Indonesia ke mata dunia. KRI Dewa Ruci merupakan kapal layar dan sekaligus kapal latih yang dimiliki Indonesia. Dalam mengemban misi-misinya KRI Dewa Ruci juga turut mendukung dalam perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Perwujudan Pilar pertama yakni berfokus dalam membangun sumber daya manusia dan Pilar ke enam yakni mengenai budaya bahari diimplementasikan oleh KRI Dewa Ruci ialah dengan membangun karakter bangsa maritim. Untuk mendukung Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia ini maka KRI Dewa Ruci bersinergi dengan program dari Kemenkomaritim melalui kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya. Kegiatan ini merupakan wujud pengimplementasian dalam meningkatkan pemahaman mengenai peningkatan sumber daya manusia terhadap budaya bahari di semua lapisan jenjang pendidikan.

Mengingat minimnya masyarakat yang masih rendah pemahamannya tentang kelautan, Pemerintah disini baik itu TNI Angkatan Laut maupun Kemenkomaritim dan Kementerian Luar Negeri juga seharusnya bersinergi memberikan pelatihan dan pembekalan khusus bagi para masyarakat yang nantinya akan ikut pelayaran di KRI Dewa Ruci.

Kemudian di pilar ketujuh mengenai diplomasi maritim, KRI Dewa Ruci juga ikut serta dalam event sail internasional di berbagai negara. Melalui event yang dilaksanakan dalam KRI Dewa Ruci tersebut, TNI Angkatan Laut banyak melakukan diplomasi ke berbagai negara meliputi kerjasama pertahanan maupun pendidikan hingga promosi wisata Indonesia.

3. Implementasi muhibah KRI Dewa Ruci dalam mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Poros Maritim Dunia

Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh KRI Dewa Ruci ini dalam implementasi pilar Poros Maritim Dunia termasuk dalam pilar diplomasi maritim. KRI Dewa Ruci sudah menjalankan tugas sebagai jembatan untuk menyambung generasi muda kita utamanya para Kadet Taruna Angkatan Laut kita dengan para Angkatan Laut negara-negara di dunia. Kombinasi konsep *hard power* dan *soft power* yang dibawa oleh KRI Dewa Ruci melalui pagelaran budaya yang ditampilkan juga turut mendukung dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Mengingat jumlah lautan yang luas dan tersebarnya pulau di Indonesia dari ujung Sumatera hingga timur Papua memerlukan upaya extra dari seluruh jajaran kemaritiman sesuai tugas pokok masing-masing untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Teori Edward III menjelaskan bahwa implementasi Diplomasi Pertahanan yang dilakukan oleh KRI Dewa Ruci ini sendiri sudah mencukupi ke empat aspek tersebut yakni komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi.

5.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini telah dibuktikan bahwa teori Trinitas Angkatan Laut, Teori Diplomasi dan Konsep Diplomasi Pertahanan, Konsep Soft Power Joseph Nye dan Tinjauan Pustakan Poros Maritim Dunia dapat digunakan dalam membahas Implementasi Diplomasi Pertahanan TNI Angkatan Laut melalui misi muhibah KRI Dewa Ruci dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan rekomendasi terkait, yaitu:

- a. Saran untuk peningkatan SDM baik itu taruna maupun masyarakat umum dalam pilar pertama Poros Maritim Dunia, terkait dengan Program ENJ yang dilaksanakan oleh Kemenkomaritim dan KRI

Dewa Ruci ini tetap dilakukan baik itu di jenjang SMA dan juga diikutsertakan dari Mahasiswa atau Sekolah Pelayaran di Indonesia.

- b. Seiring dengan wujud atau citra diplomasi budaya yang dijalankan oleh KRI Dewa Ruci harapannya kedepannya KRI Dewa Ruci juga ikut melaksanakan kegiatan kemanusiaan sebagai tugas operasi militer selain perang.
- c. Kemudian untuk mendukung dalam peningkatan pemahaman masyarakat mengenai budaya bahari dan kemaritiman diperlukan KRI lain tidak hanya KRI Dewa Ruci saja yang terprogram dalam kebijakan tersebut. Khususnya untuk para kadet Taruna Angkatan Laut juga diberi pelatihan dan pendidikan mengenai kegiatan *electronic warfare* mengingat saat ini potensi ancaman di laut bisa datang dari mana saja terutama kekacauan sistem saat melakukan muhibah.
- d. Saran kepada peneliti lain, untuk melanjutkan penelitian ini di pilar kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam pilar Poros Maritim Dunia sebagai khasanah keilmuan dalam kajian mengenai Poros Maritim Dunia.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi . 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Booth, Ken. 1977. *Navies and Foreign Policy*. London: Croom Helm, Ltd
- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear: An Agenda for Security Analysis in the Post-Cold War Era*. Brighton: Weatsheat
- Cottey, Andrew and Anthony Forster. 2004. *Reshaping Defese Diplomacy : New Roles for Military Cooperation and Assistance*. New York : Oxford Univesity Press for the International Institute for Strategic Studies.
- G. R Berridge, andJames, Alan. 2003. *Dictionary of Diplomacy; Second Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- J, Sarah Tracey. 2013. *Qualitative Research Methods*, West Sussex: Wiley Blackwell.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jr, Joseph Nye. 2004. *Soft Power – The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Jr, Joseph S. Nye. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. New York: Public Affairs.
- L, Diamond and McDonald, J.W. 1996. *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*. West Hartford. CT: Kumarian Press.
- Lexy Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kulitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Limbong, Bernhard. 2015. *Poros Maritim*. Jakarta: PT Dharma Karya.
- Mochammad Yani, Yanyan, Ian Montratama dan Emil Mahyudin. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Jakarta: Intrans Publishing.
- Montville J. 1991. *Track Two Diplomacy: The Arrow and the Olive Branch*. The Psychodynamics of International Relations.
- Morghentau, Hans J. . 1973. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, revised. New York: Alfred A. Knoph.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Simamora, Parulian. 2013. *Peluang & Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfa Beta.
- Sukmadinata. 2008. Nana Syaodoh, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Supriyatno, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- T Mahan, Alfred. 1890. *The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783*. United States: Little, Brown and Co.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.

Jurnal dan Artikel

Agoes, Ety R. Diplomasi Maritim dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Unclos) 1982, Presentasi dalam Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional, Universitas Padjadjaran Bandung, 9-10 Juni 2015.

Holly Higgins. 2001. Applying Confidence-Building Measures in a Regional Context, makalah dipresentasikan dalam Building Nuclear Confidence on the Korean Peninsula: International Workshop, Institute for Science and International Security. Washington DC.

Laksamana TNI {Purn} Agus Suhartono, Indonesia Poros Maritim Dunia" Topik Bahasan "Kedaulatan Maritim Indonesia" Presentasi dalam Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional, Bandung: Universitas Padjadjaran, 9-10 Juni 2015

Marsetio. 2013. Strategi Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis. Jurnal Sejarah CITRA LEKHA. Vol XVII. No. 1 Februari 2013

NADI. 2015. Chairman's Report of the Track II Network of ASEAN Defense and Security Institutions (NADI) Workshop on Defense Diplomacy. Bali: Indonesia Defense University

Rhodon Pedrason. 2015. ASEAN's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community?. Heidelberg: Universitat Heidelberg

Richard H. Ullman. 1983. *Redefining Security*. International Security, Vol. 8 No.1: MIT Press.

Sambhi, Natalie. 2015. Jokowi's Global Maritime Axis: Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?. Jurnal Security Challenges. Volume 11, No.2.

Simon JA Mason dan Matthis Siegfried. 2013. Confidence Building Measures (CBMs) in Peace Processes: A Handbook for AU Practitioners-Process related question. Vol.1. African Union and the Centre for Humanitarian Dialogue

Website

Kemenko Maritim RI. 2017. ENJ KRI Dewa Ruci Bukan Militeristis Tetapi Membangun Jiwa Kebaharian Generasi Muda. dalam <https://maritim.go.id/enj-kri-dewa-ruci-bukan-militeristis-tetapi-membangun-jiwa-kebaharian-generasi-muda/> diakses pada tanggal 6 Juli 2018.

National Defense Canada Directorate of Maritime Strategy. Leadmark: The Navys Strategy for 2020

OSCE Conflict Prevention Centre. 2012. Guide on Non Military Confidence Building Measures (CBMs). Vienna: Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE) Secretariat

UU 34 tahun 2009 Pasal 9 Tugas tugas TNI AL